



RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PUSAT KEUANGAN POLRI TAHUN ANGGARAN 2025 - 2029



Jakarta, 18 November 2024

Kata Pengantar



Ucapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan dokumen **“Rancangan Renstra Puskeu Polri Tahun 2025-2029”** ini sebagai pedoman strategis di level Pusat maupun wilayah dalam rangka mendukung pengelolaan keuangan Polri yang transparan, akuntabel, dan berdaya guna. Dokumen ini merupakan landasan penting dalam merumuskan arah kebijakan Puskeu Polri untuk menghadapi tantangan keuangan yang semakin kompleks di masa mendatang, serta memastikan tercapainya pengelolaan keuangan yang akuntabel, efektif, dan efisien.

Selain itu, penyusunan Rancangan Awal Renstra ini didasarkan pada analisis menyeluruh terhadap dinamika dan perubahan lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal, yang memengaruhi pengelolaan keuangan negara, khususnya di lingkungan Polri. Adapun rencana strategis ini tidak hanya difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi, tetapi juga pada penguatan tata kelola keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* dan *best practices* di bidang keuangan yang bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Polri yang terintegrasi, akurat, dan tepat waktu.

Ucapan kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen **“Rancangan Renstra Puskeu Polri Tahun 2025-2029”** ini. Harapannya dokumen ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat bagi peningkatan kinerja Puskeu dalam mendukung tugas-tugas Polri secara keseluruhan, serta mampu menghadapi berbagai tantangan yang ada di bidang keuangan dengan lebih adaptif, inovatif, dan akuntabel.

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	v
BAB I PENDAHULUAN	2
I.1. Kondisi Umum Puskeu Polri.....	2
I.2. Capaian Kinerja Puskeu Polri 2020-2024.....	11
I.3. Potensi dan Permasalahan	38
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN PUSKEU POLRI	43
II.1. Visi dan Misi Polri.....	43
II.2. Visi dan Misi Puskeu Polri	45
II.3. Tujuan Polri dan Puskeu Polri	47
II.4. Sasaran Strategis Polri	49
II.5. Sasaran Strategis Puskeu Polri.....	50
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	52
III.1. Arah Kebijakan dan Strategi Polri	52
III.2. Arah Kebijakan dan Strategi Puskeu Polri	66
III.3. Kerangka Regulasi.....	71
III.4. Kerangka Kelembagaan.....	72
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	73
IV.1. Target Kinerja	73
IV.2. Kerangka Pendanaan.....	74
BAB V PENUTUP	76
LAMPIRAN.....	78

Daftar Gambar

Gambar 1 Struktur Organisasi Puskeu Polri	5
Gambar 2 Proses Utama Puskeu Polri sesuai Proses Bisnis.....	6
Gambar 3 Arah Transformasi Puskeu Polri mendukung RPJMN	10
Gambar 4 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran.....	16
Gambar 5 Persentase Jumlah Satker Polri dengan Nilai IKPA \geq 93,5	20
Gambar 6 Jumlah Bidkeu Polda dan Mabes yang mendapatkan NPHPW	22
Gambar 7 Persentase Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Satker Polri yang ditindaklanjuti	25
Gambar 8 Persentase kesesuaian antara laporan administrasi keuangan Bid Bia dengan laporan keuangan Polri	27
Gambar 9 Persentase SDM fungsi keuangan yang mendapatkan sertifikasi kompetensi bendahara.....	29
Gambar 10 Nilai Akuntabilitas Kinerja Puskeu	31
Gambar 11 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Puskeu	32

Daftar Tabel

Tabel 1 Jumlah Personel Polri Puskeu Tahun 2024	6
Tabel 2 Jumlah Personel PNS Puskeu Tahun 2024.....	7
Tabel 3 Sarana prasaran yang dimiliki oleh Puskeu Polri.....	7
Tabel 4 Opini BPK atas Laporan Keuangan.....	12
Tabel 5 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.....	15
Tabel 6 Kualitas Pelaksanaan Anggaran	16
Tabel 7 Persentase Jumlah Satker Polri dengan Nilai IKPA \geq 93,5.....	19
Tabel 8 Jumlah Bidkeu Polda dan Mabes yang mendapatkan Nota Penutup Hasil Pemeriksaan Wabkeu.....	22
Tabel 9 Persentase Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Satker Polri yang telah Ditindaklanjuti	24
Tabel 10 Persentase Kesesuaian Antara Laporan Administrasi Keuangan Bid Bia dengan Laporan Keuangan Polri	27
Tabel 11 Persentase SDM Fungsi Keuangan yang Mendapatkan Sertifikasi Kompetensi Bendahara.....	28
Tabel 12 Nilai Akuntabilitas Kinerja Puskeu	30
Tabel 13 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Puskeu	32
Tabel 14 Sasaran Strategis Polri 2025-2029	49
Tabel 15 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Puskeu Polri 2025-2029	51
Tabel 16 Kerangka Regulasi Puskeu Polri 2025-2029	71
Tabel 17 Kerangka Kelembagaan Puskeu Polri 2025-2029	72
Tabel 18 Target Kinerja Rancangan Awal Renstra Puskeu Polri 2025-2029	73
Tabel 19 Kerangka Pendanaan.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Kondisi Umum Puskeu Polri

Praktik manajemen keuangan di sektor publik secara global telah berfokus pada pengendalian anggaran, pelaporan keuangan, dan akuntabilitas. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi pergeseran menuju praktik manajemen keuangan yang lebih strategis, didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan responsivitas di tengah meningkatnya ekspektasi publik dan keterbatasan fiskal. Di negara-negara maju, reformasi manajemen keuangan telah menekankan penganggaran berbasis kinerja, akuntansi akrual, dan adopsi Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional (IPSAS). Reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan, memastikan alokasi sumber daya yang lebih baik sesuai dengan prioritas kebijakan, dan meningkatkan kualitas informasi keuangan yang tersedia bagi para pemangku kepentingan.¹

Manajemen keuangan di sektor publik memiliki peran penting dalam memastikan bahwa lembaga pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya dengan efisien, menjaga disiplin fiskal, dan memberikan pelayanan publik secara efektif. Dengan munculnya *Society 5.0*, era sosial-ekonomi baru yang ditandai dengan integrasi antara dunia maya dan dunia fisik melalui teknologi canggih, lanskap global manajemen keuangan di sektor publik mengalami transformasi signifikan.

Society 5.0, sebuah konsep yang diperkenalkan oleh Jepang, menggambarkan sebuah masyarakat yang berpusat pada manusia di mana kemajuan teknologi seperti *Internet of Things* (IoT), Kecerdasan Buatan (AI), dan *big data* terintegrasi secara sempurna dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, manajemen keuangan sektor publik

¹ Bergmann, A. (2019). *Public Sector Accounting*. Springer.

harus berkembang untuk memanfaatkan potensi teknologi ini sambil menghadapi risiko yang terkait.²

Salah satu peluang utama yang dihadirkan oleh *Society 5.0* adalah kemampuan untuk memanfaatkan analitik *big data* dan AI untuk meningkatkan pengambilan keputusan keuangan. Dengan menggunakan analitik canggih, organisasi sektor publik dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang pola pengeluaran, mengidentifikasi ketidakefisienan, dan mengoptimalkan alokasi sumber daya. Sebagai contoh, analitik prediktif dapat digunakan untuk meramalkan tren pendapatan, mendeteksi kecurangan, dan menilai dampak keuangan dari keputusan kebijakan.³

Indonesia, sebagai ekonomi yang sedang berkembang, telah menyadari pentingnya mengintegrasikan praktik manajemen keuangan canggih dalam sektor publiknya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. RPJMN dan RPJPN merupakan cetak biru strategis yang mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi negara. Dalam konteks *Society 5.0*, rencana pembangunan Indonesia menekankan perlunya inovasi dan pertumbuhan yang didorong oleh teknologi, sejalan dengan tren global dalam manajemen keuangan sektor publik. RPJMN, misalnya, menetapkan tujuan strategis yang mencakup peningkatan efektivitas dan efisiensi manajemen keuangan publik, peningkatan pembangunan infrastruktur, dan mendorong transformasi digital di seluruh lembaga pemerintah.⁴

Transisi ke era *Society 5.0* merupakan momen penting bagi Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut Polri), khususnya Pusat Keuangan (Puskeu) Polri, yang membuka peluang akan sesuatu hal yang belum pernah terjadi sebelumnya sekaligus juga membuat organisasi terpapar risiko yang signifikan. Adapun risiko-risiko yang dihadapi oleh Puskeu dalam menghadapi era *Society 5.0* antara lain:

1. Risiko keamanan siber;

² Cabinet Office of Japan. (2016). *Society 5.0*

³ Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2019). Defining Digital Transformation: Results from Expert Interviews. *Government Information Quarterly*, 36(4), 101385. doi:10.1016/j.giq.2019.06.002

⁴ Bappenas. (2020). *Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

2. Risiko integritas dan keakurasian data;
3. Risiko kepatuhan terhadap regulasi;
4. Risiko operasional; dan
5. Risiko manajemen perubahan.

Dengan menangani area kunci seperti keamanan siber, integritas data, kepatuhan regulasi, stabilitas operasional, dan manajemen perubahan, Puskeu dapat menavigasi lanskap kompleks ini dengan efektif. Mengelola risiko-risiko ini secara proaktif sangat penting, tidak hanya untuk menjaga integritas organisasi Puskeu tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi operasionalnya. Dengan mengadopsi pendekatan strategis terhadap manajemen risiko, Puskeu dapat memanfaatkan sepenuhnya potensi kemajuan teknologi sambil mempertahankan kepercayaan dan keyakinan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal. Pendekatan yang hati-hati perlu dilakukan oleh Puskeu dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis agar Puskeu dapat menjadi organisasi yang unggul pada era *Society 5.0*.

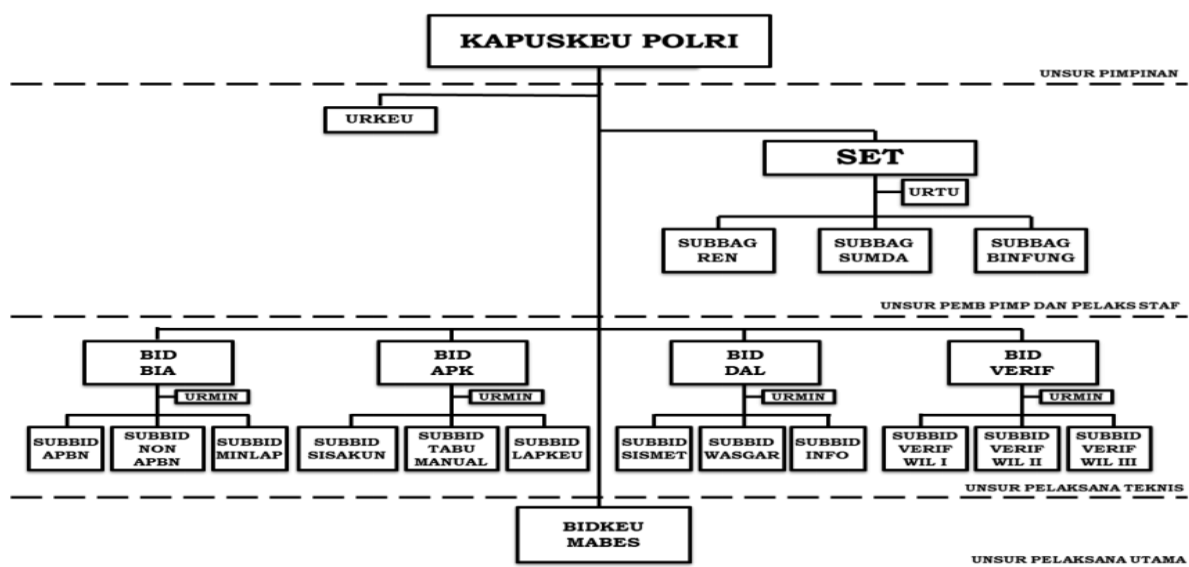
Transformasi pengelolaan keuangan di lingkungan Polri dimulai dengan diterbitkannya satu paket regulasi yang terdiri dari 3 (tiga) undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga Undang-undang tersebut secara kolektif menekankan bahwa manajemen keuangan pada sektor publik di Indonesia harus dilakukan secara efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Kebijakan ini kemudian mendorong seluruh Kementerian/Lembaga yang menggunakan anggaran Negara, dalam hal ini Polri, untuk berbenah dan bertransformasi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang modern dan akuntabel.

Dalam upaya memodernisasikan pengelolannya secara menyeluruh, Polri dihadapkan pada berbagai tantangan yang cukup dinamis. Dinamika tantangan yang dihadapi oleh Polri sudah semakin bervariasi, yang mana hal ini merupakan konsekuensi dari perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Saat ini dunia.....

dunia telah memasuki era *Society 5.0* atau dapat juga disebut sebagai *super-smart society*⁵. Kemajuan teknologi yang sedemikian rupa merupakan tantangan dan juga potensi yang perlu untuk dioptimalkan oleh Polri dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan pada hal tantangan-tantangan tersebut, Polri melalui Puskeu perlu untuk menyusun Rencana Strategis sebagai pedoman dalam menghadapi, melalui, dan mengkomodir perkembangan zaman di era *Society 5.0*.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Puskeu Polri menyusun Rencana Strategis (selanjutnya disebut Renstra) dengan berpedoman pada Peraturan Bappenas No 10 Tahun 2023 tentang Penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga dengan tetap mengedepankan nilai-nilai yang diusung pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (selanjutnya disebut RPJMN). Renstra yang disusun oleh Puskeu Polri ini telah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang ada di dalam Renstra Polri dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas yang aman dan tertib.

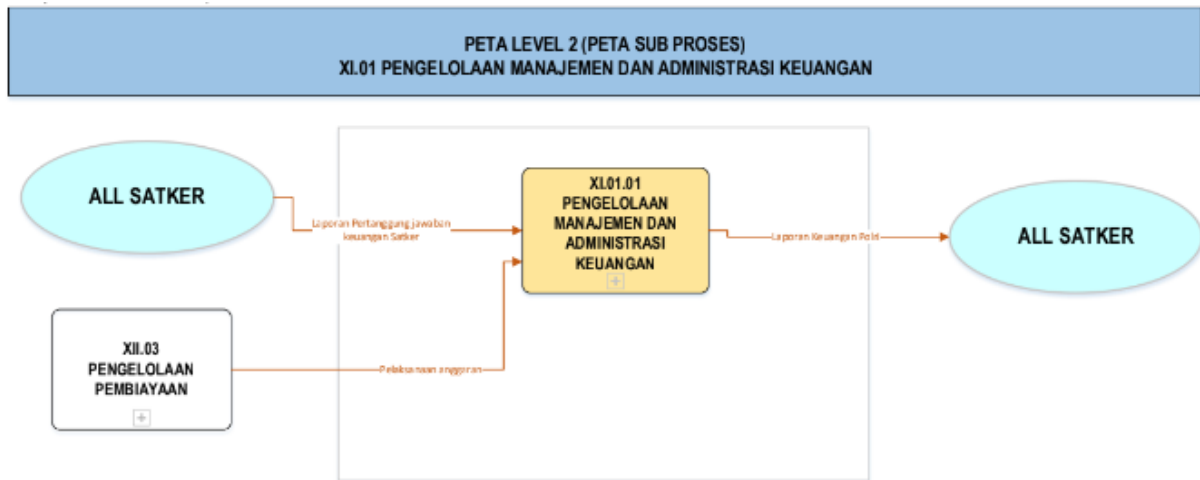
Puskeu Polri bekerja berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.



Gambar 1 Struktur Organisasi Puskeu Polri

⁵ George, A. Shaji, and AS Hovan George. "Towards a Super Smart Society 5.0: Opportunities and Challenges of Integrating Emerging Technologies for Social Innovation." (2024).

Selain berdasarkan pada SOTK Polri, Puskeu dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga berpedoman pada dokumen Peta Proses Bisnis terbaru yang telah disusun pada tahun 2023. Berikut ini merupakan salah satu peta level 2 dari dokumen Probis Puskeu terkait dengan Pengelolaan Manajemen dan Administrasi Keuangan.



Gambar 2 Proses Utama Puskeu Polri sesuai Proses Bisnis

Pada periode 2025-2029, Puskeu Polri dituntut untuk mampu berperan aktif dalam mendukung pengelolaan dan administrasi keuangan Polri dengan menjadi pembina fungsi keuangan Polri yang akuntabel dan modern. Hal ini bertujuan untuk mendukung rencana Polri menjadi Polri PRESISI dengan melakukan transformasi pada bidang organisasi, operasional, pelayanan publik dan pengawasan. Oleh karena itu, Puskeu Polri dituntut untuk menjadi organisasi yang efisien dan akuntabel dalam mengelola keuangan Polri. Peran Puskeu dalam mendukung pengelolaan dan administrasi keuangan Polri juga didukung oleh berbagai sumber daya yang dimiliki Puskeu, antara lain sumber daya manusia dan sarana dan prasarana. Berikut ini adalah sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Puskeu

- Sumber Daya Manusia

1. Jumlah personel Polri Puskeu Polri tahun 2024 (November 2024)

Tabel 1 Jumlah Personel Polri Puskeu Tahun 2024

NO	PANGKAT	JUMLAH
1	BRIGJEN POL	2
2	KBP	7
3	AKBP	6
4	KOMPOL	4

NO	PANGKAT	JUMLAH
5	AKP	3
6	IPTU	2
7	IPDA	6
8	BRIPKA	2
9	BRIGADIR	6
10	BRIPTU	1
11	BRIPDA	7
	JUMLAH TOTAL	46

2. Jumlah Personel PNS Puskeu Polri Tahun 2024 (November 2024)

Tabel 2 Jumlah Personel PNS Puskeu Tahun 2024

NO	PANGKAT	JUMLAH
1	GOLONGAN IV B	3
	GOLONGAN IV A	13
2	GOLONGAN III D	14
	GOLONGAN III C	8
	GOLONGAN III B	16
	GOLONGAN III A	12
3	GOLONGAN II D	10
	GOLONGAN II C	11
	GOLONGAN II B	0
	GOLONGAN II A	0
4	PPPK	1
	JUMLAH TOTAL	88

- Sarana Prasarana

Sarana prasaran yang dimiliki oleh Puskeu Polri dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas operasional maupun bidang administrasi sebagai berikut:

Tabel 3 Sarana prasaran yang dimiliki oleh Puskeu Polri

NO	JENIS MATERIIL	JUMLAH
1	Kendaraan bermotor roda 4	22
2	Kendaraan bermotor roda 2	26
3	Mesin ketik listrik	19
4	Mesin hitung listrik	27
5	Mesin ft copy	9
6	Lemari besi/metal	16
7	Lemari kayu	119
8	Filling kabinet besi	22
9	Filling kabinet kayu	1

NO	JENIS MATERIIL	JUMLAH
10	Brankas	13
11	Buffet	5
12	Tabung pemadam api	2
13	CCTV	2
14	White board	2
15	Alat penghancur kertas	9
16	Mesin absensi	1
17	Overhead projector	2
18	Infocus	2
19	Meja kerja kayu	276
20	Kursi besi/metal	395
21	Kursi kayu	12
22	Meja rapat	12
23	Meja komputer	28
24	Facsmile	12
25	Network monitoring system	9
26	Mesin scanning	8
27	Stabilizer/ups	80
28	Personal Computer	161
29	Laptop	159
30	Tablet PC	40
31	Monitor	17
32	Printer	86
33	Server	27
34	Network Cable Tester	66
35	Peralatan komputer lainnya	10
36	Bahan kartografi lainnya	1

Dalam melaksanakan tugas, Puskeu Polri menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi mulai dari aspek kebijakan, strategi, anggaran, sumber daya manusia dan pembinaan fungsi keuangan di lingkungan Polri. Pada pelaksanaan tugas secara teknis Puskeu Polri terfokus pada empat bidang yaitu bidang pembiayaan, akuntansi pelaporan keuangan, pengendalian dan verifikasi. Secara umum, Puskeu Polri mengemban fungsi pengelolaan dan pembinaan keuangan dimana dalam melaksanakan kerjanya berpedoman kepada Renstra yang telah berhasil dirancang ini. Renstra Puskeu Polri 2025-2029 ini tidak lain merujuk kepada Renstra Polri 2025-2029 yang sasaran utamanya adalah terwujudnya pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka dan melayani.

Sedikit.....

Sedikit berbeda dengan sistematika dan metode pada Renstra sebelumnya, penyusunan Renstra Puskeu Polri Tahun 2025-2029 dilandaskan pada *Grand Strategy* Polri 2025-2045, Rancangan Teknokratik RPJM Nasional 2025-2029, serta capaian kinerja pada Renstra Puskeu Polri pada periode 2020-2024. Penyusunan Renstra Puskeu Polri 2025-2029 pun menggunakan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan Renstra periode sebelumnya, yang mana pada penyusunan Renstra periode 2025-2029 mengacu pada ketentuan Peraturan Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029.

Sehubungan dengan Konsep Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dengan tema pembangunan menuju **"Indonesia Emas 2045"** dengan Sasaran Visi **"Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan"** dimana terdapat 5 Sasaran Visi Indonesia Emas dan 8 Misi (Agenda) Pembangunan serta 17 Arah Pembangunan Indonesia Emas. Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah telah menetapkan fokus arah pembangunan nasional dan Arah Kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 dititikberatkan pada **Penguatan Fondasi Transformasi** melalui:

1. Transformasi Sosial;
2. Transformasi Ekonomi;
3. Transformasi Tata Kelola
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia;
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas;
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan
8. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan.

Mewujudkan.....

Mewujudkan Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan



Gambar 3 Arah Transformasi Puskeu Polri mendukung RPJMN

Kerangka Teknokratik Bidang Pertahanan dan Keamanan dalam Konsep Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029 dengan misi 8 (delapan) agenda Pembangunan. Posisi Polri secara tugas dan fungsi masuk ke dalam agenda **Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia**, yang memiliki arah tujuan Pembangunan Indonesia Emas di antaranya adalah:

1. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial;
2. Stabilitas Ekonomi Makro; dan
3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan.

Penyusunan Renstra Puskeu ini menggunakan pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) secara teknokratik dan partisipatif. Pendekatan ini dapat dimaknai sebagai upaya Puskeu dalam mendukung kinerja Polri, dan upaya Polri dalam mengomodasi aspirasi dari Satker dibawahnya, dalam hal ini Puskeu. Lebih dari itu, pendekatan *top-down* dan *bottom-up* juga digunakan sebagai wujud dari upaya Puskeu dalam menjaga keutuhan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dengan memperhatikan dan menyesuaikan visi dan misi Polri periode 2025-2029

Oleh karena penyusunan Renstra Puskeu Polri 2025-2029 ini berlandaskan pada kinerja dari Renstra Puskeu Polri 2020-2024, maka indikator-indikator kinerja yang.....

yang digunakan pun tetap mengacu pada indikator-indikator kinerja yang digunakan pada periode sebelumnya demi menjaga relevansi. Adapun indikator-indikator kinerja yang akan digunakan antara lain: Opini BPK atas Laporan Keuangan Polri; Persentase Laporan Keuangan Satker Jajaran Mabes dan Satker Jajaran Wilayah yang Tepat Saji; Jumlah NPHPW yang Diterbitkan di Lingkungan Polri; Persentase Efektivitas Penilaian PIPK pada Satker di Lingkungan Polri yang memperoleh penilaian: Efektif atau Efektif Dengan Pengecualian; Persentase Penyelesaian TKTM; Nilai IKPA Polri; Persentase Jumlah Satker Polri dengan Nilai IKPA $\geq 93,75$; Nilai AKIP Puskeu Polri; Nilai Kinerja Anggaran Puskeu Polri; Indeks Profesionalitas SDM Puskeu Polri; Persentase SDM Fungsi Keuangan yang Mendapatkan Sertifikasi Kompetensi Keuangan; dan Jumlah Pelaksanaan Anev terhadap Dokumen Pembinaan Fungsi di Puskeu Polri.

Bagian berikutnya dari Renstra Puskeu ini akan menjabarkan capaian dari Puskeu selama periode 2020-2024 yang merupakan gambaran dari kondisi Puskeu saat Renstra ini disusun, diikuti dengan tantangan yang dihadapi oleh Puskeu Polri dalam menyongsong tahun anggaran 2025-2029.

I.2. Capaian Kinerja Puskeu Polri 2020-2024

Puskeu Polri mengalami tantangan yang cukup signifikan dalam upaya melaksanakan Renstra periode 2020-2024. Hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang menyerang seluruh Negara, termasuk Indonesia. Adanya pandemi Covid-19 ini kemudian memengaruhi kinerja seluruh Satker pada tahun 2020 dan 2021, termasuk Puskeu Polri. Walaupun menghadapi tantangan yang cukup disruptif, Puskeu Polri tetap mampu mempertahankan kinerjanya untuk tahun anggaran 2020-2021 berdasarkan pada hasil Laporan Kinerja pada tahun tersebut. Pencapaian kinerja Puskeu Polri ini tentunya tidak terlepas dari kemampuan Puskeu dalam beradaptasi dengan kondisi lingkungan strategis dan tetap berpedoman pada tugas pokok dan fungsi berdasarkan pada Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Polri. Selanjutnya pada bab ini akan menjelaskan mengenai hasil capaian Puskeu Polri selama periode tahun 2020-2024 berdasarkan indikator kinerjanya.

Opini.....

Opini BPK atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Polri melalui Puskeu berhasil mempertahankan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** selama lima tahun terakhir sejak tahun 2020. Secara keseluruhan, Polri melalui Puskeu telah berhasil mempertahankan opini WTP **selama 11 kali berturut-turut** dimulai pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2023. Adapun realisasi terhadap penilaian Laporan keuangan Polri untuk tahun 2024 belum dapat dituangkan pada tabel ini karena penilaian akhir dari Laporan Keuangan Polri tahun 2024 baru akan diberikan pada tahun 2025. Indikator ini merupakan muara dari upaya Polri dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara, serta merupakan kinerja kolektif dari seluruh Laporan Keuangan Satker Polri yang kemudian diwadahi ke dalam Laporan Keuangan Polri. Capaian opini WTP ini sudah selaras dengan target indikator tersebut, yang mana Polri selalu berupaya untuk menjadikan opini WTP sebagai target indikator setiap tahunnya.

Tabel 4 Opini BPK atas Laporan Keuangan

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	WTP	WTP	100%
2021	WTP	WTP	100%
2022	WTP	WTP	100%
2023	WTP	WTP	100%
2024	WTP	-	-

Walaupun opini WTP merupakan target yang sama dari tahun ke tahun dan selalu tercapai sejak tahun 2013, namun pada lingkungan praktis opini WTP bukanlah sesuatu yang dapat diraih dengan mudah. Opini WTP terhadap Laporan Keuangan merupakan bentuk dari usaha Polri dalam mewujudkan pengelolaan keuangan Polri yang.....

yang akuntabel dan transparan. Adapun dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Polri melalui Puskeu melakukan beberapa kegiatan, antara lain:

1. Pemeriksaan wilayah;
2. Rekonsiliasi *asset* dengan Slog Polri; dan
3. Bimbingan Teknis (Bimtek) bendahara penerimaan.

Adapun dari kegiatan-kegiatan tersebut, *output* yang diharapkan dapat dicapai adalah:

1. Laporan keuangan Polri yang akuntabel;
2. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) aset dengan Slog Polri; dan
3. Kesiapan Satker dalam mempersiapkan dan menyusun Laporan Keuangan Polri *Unaudited*.

Selain dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Puskeu Polri di atas, terdapat faktor faktor lain yang berpengaruh dalam mencapai opini WTP atas Laporan Keuangan Polri. Faktor-faktor ini kemudian dapat kita kategorisasi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor-faktor internal antara lain:

1. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2023;
2. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai;
3. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap kegiatan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu; dan
4. Dilaksanakannya rapat evaluasi setiap triwulan terkait capaian kinerja, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil.

Sementara itu yang dapat dikategorikan sebagai faktor eksternal dalam hal ini antara lain:

1. Adanya.....

1. Adanya program/kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung penyajian dan penyusunan Laporan Keuangan Polri; dan
2. Adanya koordinasi, sinergi serta komitmen antara fungsi Pengawasan, fungsi Perencanaan, fungsi Logistik, fungsi Keuangan dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku penanggungjawab tata kelola keuangan tingkat Satker.

Seperti yang sudah dijelaskan pada beberapa paragraf sebelumnya, opini WTP atas Laporan Keuangan ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk diraih ataupun dipertahankan. Walaupun target utamanya telah tercapai, namun masih terdapat catatan-catatan yang perlu menjadi perhatian Puskeu Polri agar di masa depan Polri dapat terus mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan. Adapun catatan-catatan atau temuan yang perlu menjadi perhatian antara lain:

1. Masih terdapat kendala yang dihadapi oleh operator terkait penggunaan Aplikasi Sakti;
2. Terdapat Polda yang melaksanakan/menerima Hibah Barang dan Hibah Uang yang belum disahkan;
3. Terdapat Hibah TAYL temuan BPK RI yang belum disahkan;
4. Masih terdapat DIPA yang belum direvisi secara optimal;
5. Masih terdapat selisih pada pendapatan perolehan *asset* lainnya dikarenakan belum dikoreksi dan SAKTI telah tutup periode;
6. Masih terdapat selisih terkait pendapatan dan pencatatan penerimaan;
7. Terdapat beberapa data Barang bukti belum disertai dengan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR);
8. Masih terdapat Kas dan bank BLU belum disahkan, tidak memiliki setara kas dan deposito, data transaksi resipokal belum disahkan dan masih harus melengkapi dokumen sumbernya dan data pada *spreadsheet*;
9. Masih terdapat pagu minus Belanja pegawai;
10. Masih terdapat salah catat dan salah input pada akun piutang tagihan covid;
11. Ada kesalahan input pada akun pendapatan perolehan asset lainnya; dan
12. Terdapat.....

12. Terdapat kas dan bank belum disahkan pada Satker BLU.

Catatan atau temuan-temuan tersebut akan menjadi bahan analisa dan evaluasi Puskeu Polri dengan harapan ke depannya temuan-temuan tersebut tidak menjadi sesuatu yang berulang, sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Puskeu Polri dapat secara optimal menjadi pembina fungsi keuangan di lingkungan Polri, baik itu pusat maupun kewilayahan.

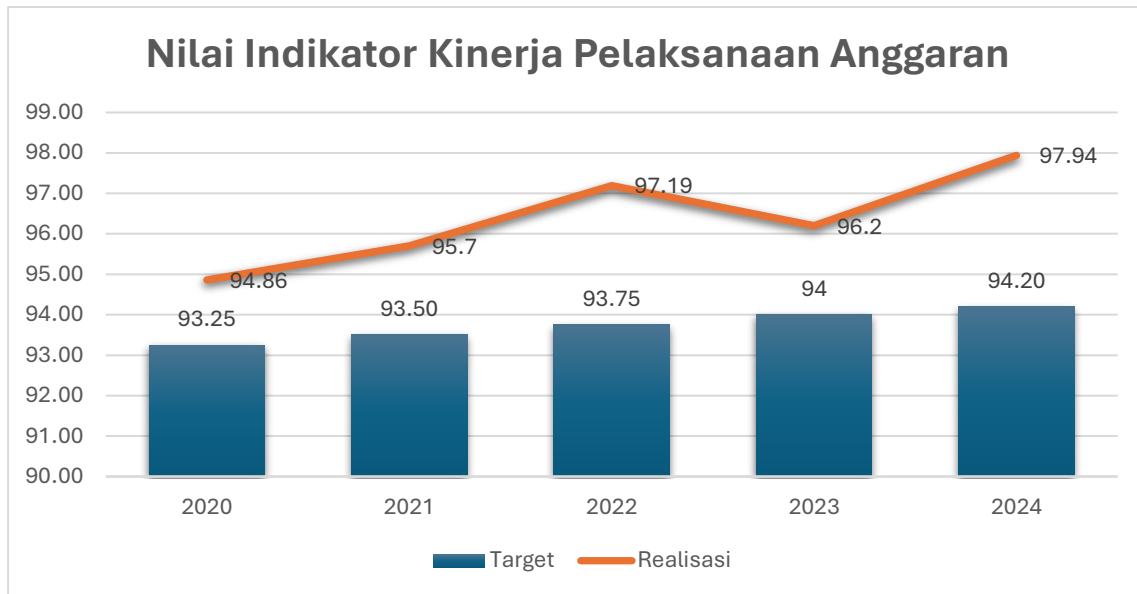
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Instansi Pusat (LKIP), Polri pada Tahun 2023 mencatat Indikator Nilai Kinerja Anggaran sebesar 96.20, dua poin lebih besar dibandingkan dengan target yang telah disepakati dengan tingkat capaian sebesar 102.3%.

Tabel 5 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	93.25	94.86	101.7%
2021	93.50	95.70	102.4%
2022	93.75	97.19	103.7%
2023	94	96.2	102.3%
2024	94.25	97.94 ⁶	103.9%

⁶ Nilai per TW III 2024 berdasarkan hasil anev



Gambar 4 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Berdasarkan pada tabel dan grafik di atas, maka dapat diketahui bahwa sejak tahun 2020 hingga tahun 2022, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Nilai IKPA) Polri selalu meningkat setiap tahunnya, dengan tingkat capaian di atas 100% berturut-turut. Pada tahun 2023 Nilai IKPA Polri relatif mengalami penurunan namun masih berada di tingkat capaian 100%. Apabila mengacu pada aplikasi OmSpan Kemenkeu RI, maka dapat diketahui bahwa penurunan ini disebabkan oleh menurunnya nilai pada indikator deviasi halaman III DIPA dan dispensasi SPM.

Tabel 6 Kualitas Pelaksanaan Anggaran

K/L	KATEGORI IKPA	INDIKATOR PENGUKURAN	NILAI	BOBOT	NILAI AKHIR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	I KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN	1 Revisi DIPA	99.97	10	10
		2 Deviasi Hal III DIPA	89.23	15	13.38
	II KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN	3 Penyerapan Anggaran	100.00	20	20.00
		4 Belanja Kontraktual	100.00	10	10
		5 Penyelesaian Tagihan	99.63	10	9.96
		6 Pengelolaan UP dan TUP	98.07	10	9.81
	III KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	7 Capaian Output	99.16	25	24.79
NILAI TOTAL					97.94
KONVENSI BOBOT					100
DISPENSASI SPM (PENGURANG)					0,00
NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVENSI BOBOT)					97.94

Sumber Data : Aplikasi OM SPAN per 14 Oktober 2024

Kemudian.....

Kemudian berdasarkan data yang diakses pada aplikasi OM SPAN, Nilai IKPA Polri pada periode TW III tahun 2024 adalah 97,94. Walaupun ini merupakan Nilai IKPA pada bulan September 2024, nilai ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Nilai IKPA Polri pada periode TW IV tahun 2023, yakni 96,2.

Tentunya ini adalah prestasi yang membanggakan bagi Polri, dan merupakan sesuatu hal yang wajib untuk dipertahankan di masa mendatang. Oleh karenanya dalam upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan Nilai IKPA tersebut, Polri melalui Puskeu akan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Tetap menjaga tata kelola anggaran yaitu:
 - a. Mengendalikan revisi anggaran secara sangat selektif;
 - b. Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan, pengadaan barang/jasa, dan penyerapan anggaran untuk sisa alokasi belanja sesuai target;
 - c. Menyampaikan data kontrak, pertanggungjawaban UP-TUP, dan penyelesaian tagihan secara tepat waktu dan akurat;
 - d. Meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran;
 - e. Memperhatikan konsistensi antara jadwal kegiatan dan realisasi belanja dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) pada DIPA dan menjaga akurasi dengan batas toleransi deviasi tidak lebih dari 5% (lima persen); dan
 - f. Melaporkan serta mengakselerasi capaian *output* sesuai target serta tepat waktu;
2. Meningkatkan koordinasi antara fungsi perencanaan, fungsi keuangan dan pelaksana kegiatan satker;
3. Kasatker selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan anggaran pada Satkernya;
4. Meningkatkan koordinasi dengan Kanwil Dirjen Perbendaharaan dan KPPN mitra kerja setempat serta memanfaatkan layanan konsultasi helpdesk HAI-DJPb.

Walaupun tingkat realisasi Nilai IKPA Polri jauh melebihi target yang telah ditetapkan, namun pada kenyataannya terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh

Polri.....

Polri dalam hal ini Puskeu dalam upaya mencapai Nilai IKPA yang sedemikian rupa. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Polri maupun Puskeu pada indikator ini antara lain:

1. Jumlah Satker Polri yang sangat besar (T.A. 2023 = 1.435);
2. Sesuai dengan tugas dan fungsinya (Harkamtibmas), Polri selalu dilibatkan dalam kegiatan pengamanan pelaksanaan agenda nasional/internasional sehingga mengakibatkan beberapa kegiatan rutin yang sudah direncanakan Satker/ Satwil mengalami penundaan/perubahan waktu pelaksanaan;
3. Masih terjadi beberapa proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan mendekati akhir Tahun Anggaran sehingga akan terjadi penumpukan tagihan di akhir Tahun Anggaran;
4. Terdapat beberapa Satker yang belum melakukan penyesuaian Hal III DIPA;
5. Ketertiban Satker dalam pengelolaan uang persediaan, memasukkan data kontrak tepat waktu, menghindari kesalahan dalam membuat Surat Perintah Membayar (SPM), Menghindari Retur SP2D, melaksanakan penyerapan anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Penarikan Dana (Halaman III DIPA), menghindari/meminimalisir revisi DIPA, penyelesaian tagihan tepat waktu, menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara, membuat perencanaan kas yang baik dan realisasi anggaran yang tepat waktu sesuai dengan rencana kegiatan Satker serta melakukan pelaporan capaian output secara akurat pada aplikasi SAS dan SAKTI secara disiplin setiap bulan merupakan faktor penunjang dalam keberhasilan pencapaian target pada Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Dalam upaya menanggulangi kendala-kendala yang demikian, Puskeu Polri telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melaksanakan anev atas hasil capaian IKPA Polri, Tingkat Wilayah dan Tingkat satker setiap Triwulan dan Tahunan;
2. Secara periodik memberikan arahan ke jajaran Polri terkait optimalisasi hasil capaian IKPA satker;

3. Melaksanakan.....

3. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi IKPA Polri bagi para Kasubbid Dalverif Bidkeu;
4. Mengikuti kegiatan *sharing session* atau *coaching clinic* tentang IKPA yang diselenggarakan oleh KPPN, Kanwil atau Dit PA Dirjen Perbendaharaan baik secara *online* maupun *offline*;
5. Memberikan penghargaan dari Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu atas capaian IKPA kepada Polda dengan nilai IKPA tingkat wilayah terbaik dan kepada Satker dengan nilai IKPA tingkat satker terbaik berdasarkan nilai pagu DIPA.

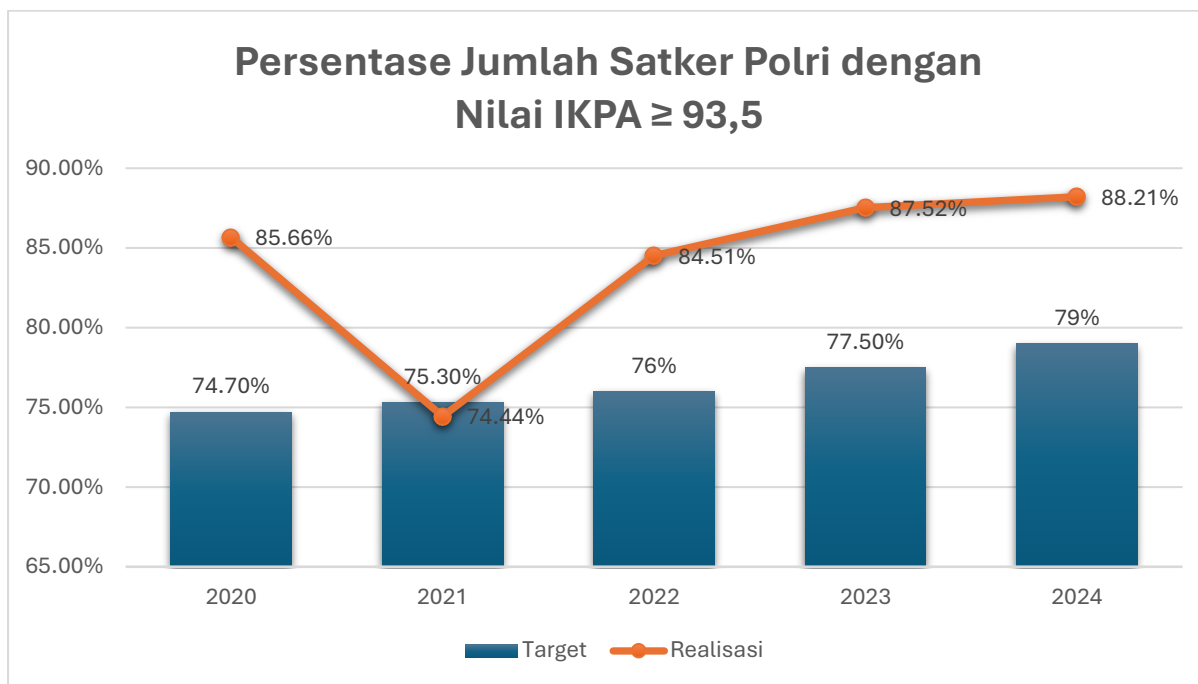
Persentase Jumlah Satker Polri dengan Nilai IKPA \geq 93,5

Indikator Kinerja Persentase jumlah Satker Polri dengan nilai IKPA \geq 93,5 merupakan indikator yang telah ditetapkan oleh Puskeu Polri untuk melihat dan mengukur kualitas dari kinerja anggaran belanja di masing-masing Satker Polri. Kualitas dari kinerja pelaksanaan anggaran pada indikator ini untuk mengukur sejauh mana realisasi pelaksanaan anggaran dibandingkan dengan perencanaan. Berikut ini merupakan realisasi atas capaian untuk indikator Persentase jumlah Satker Polri dengan nilai IKPA \geq 93,5.

Tabel 7 Persentase Jumlah Satker Polri dengan Nilai IKPA \geq 93,5

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	74.70%	85.66%	114.7%
2021	75.30%	74.77%	98.9%
2022	76%	84.51%	111.2%
2023	77.50%	87.52%	112.9%
2024	79%	88.21% ⁷	111.6%

⁷ Nilai per TW III 2024 berdasarkan hasil anev



Gambar 5 Persentase Jumlah Satker Polri dengan Nilai IKPA $\geq 93,5$

Berdasarkan pada tabel dan grafik di atas, maka dapat diketahui bahwa secara garis besar persentase jumlah dari Satker Polri yang mendapatkan nilai IKPA $\geq 93,5$ pada periode 2020 hingga tahun 2023 selalu jauh berada di atas target yang telah ditentukan, terkecuali untuk tahun 2021. Pada tahun 2023 dari target 77,5% atau 1.112 Satker tercapai 87,52% atau 1.256 Satker. Adapun terkait dengan nilai pada tahun 2024 masih menggunakan realisasi kinerja berdasarkan data TW III Tahun 2024, yakni sebanyak 88,21% Satker Polri yang memiliki nilai IKPA sebesar $\geq 93,5$. Nilai IKPA Satker merupakan hasil perhitungan atas nilai kinerja dan bobot dari seluruh indikator kinerja berdasarkan data transaksi yang dilakukan pada tingkat Satker. Persentase jumlah Satker Polri dengan nilai IKPA $\geq 93,5$ dihitung berdasarkan capaian nilai IKPA masing-masing satker yang lebih dari atau sama dengan 93,5 dibandingkan dengan jumlah Satker yang merupakan total keseluruhan jumlah satker Polri. Penilaian IKPA menjadi *basis* penilaian kinerja K/L, oleh karena itu mulai dari tingkat Satker, tingkat Eselon I (Wilayah/Polda) dan tingkat K/L untuk selalu melakukan pengawasan dan pengendalian atas hasil capaiannya.

Lebih.....

Lebih lanjut, terdapat pula beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam menentukan Nilai Akhir dari kinerja pelaksanaan anggaran. Adapun aspek-aspek yang perlu diperhatikan antara lain:⁸

1. Aspek Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan, diukur melalui indikator Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA serta pagu minus;
2. Aspek Kepatuhan Terhadap Regulasi, diukur melalui indikator ketepatan penyampaian data kontrak, pengelolaan UP dan TUP, ketepatan waktu dan data LPJ Bendahara dan dispensasi penyampaian SPM;
3. Aspek Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan, diukur melalui tingkat penyerapan anggaran, ketepatan penyelesaian tagihan, konfirmasi Capaian Output dan sering tidaknya satuan kerja mengalami retur SP2D; dan
4. Aspek Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan, diukur melalui indikator Keakurasian dalam penyampaian Renkas dan jumlah penerbitan SPM Satker yang benar (tidak dikembalikan oleh KPPN).

Persentase Jumlah Bidkeu Polda dan Mabes yang mendapatkan NPHPW oleh Puskeu Polri

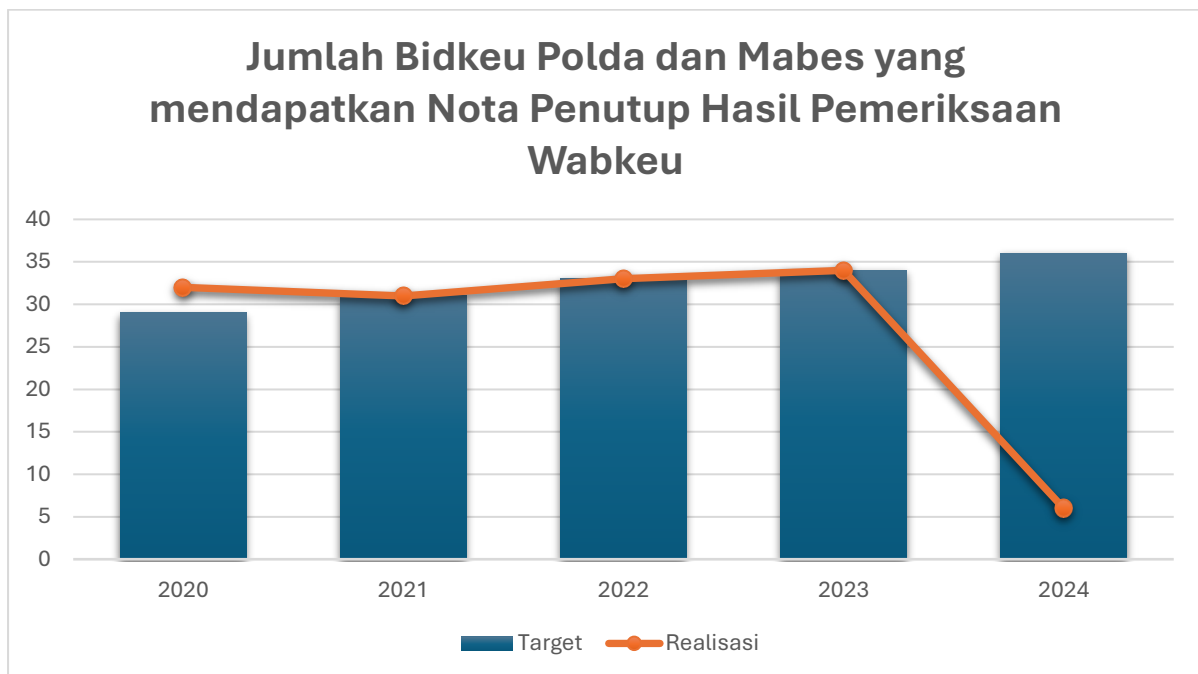
Nota Penutup Hasil Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan (NPHPW) merupakan nota yang diterbitkan oleh Kapuskeu Polri kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dengan tembusan kepada Irwasum Polri dan Kapolda (untuk Satker Kewilayahan) apabila dalam verifikasi tidak ditemukan kekurangan dan/atau kesalahan dalam dokumen Perwabkeu. Adapun lingkup verifikasi Perwabkeu dari Kabidkeu, yaitu mengenai:

1. Kesesuaian mekanisme pembayaran dengan ketentuan perundangundangan;
2. Hak atas tagihan telah dibayarkan kepada yang berhak;
3. Pengeluaran telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

⁸ DJPb Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Tabel 8 Jumlah Bidkeu Polda dan Mabes yang mendapatkan Nota Penutup Hasil Pemeriksaan Wabkeu

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	29	32	110.3%
2021	31	31	100%
2022	33	33	100%
2023	34	34	100%
2024	36	6 ⁹	16,7%



Gambar 6 Jumlah Bidkeu Polda dan Mabes yang mendapatkan NPHPW

Berdasarkan capaian NPHPW yang disajikan pada tabel dan grafik di atas, maka dapat diketahui bahwa target pada indikator ini selalu meningkat di setiap tahunnya. Peningkatan target jumlah Bidkeu pada di setiap tahunnya ini berbanding lurus dengan tingkat capaian dari indikator ini, bahkan dengan target yang meningkat setiap tahunnya Puskeu selalu berhasil untuk memenuhi target dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, kinerja Puskeu pada tahun 2024

⁹ Data berdasarkan TW III 2024

masih.....

masih berdasarkan hasil anev TW III tahun 2024. Realisasi yang relatif rendah tersebut disebabkan karena masih banyak Polda yang belum mendapatkan 45% dari total NPHPW yang ditargetkan. Namun demikian Puskeu terus optimis bahwa target pada indikator ini akan tercapai ketika Tahun Anggaran selesai. Tingkat capaian yang demikian bukan berarti Puskeu tidak mendapati masalah atau kendala pada pelaksanaannya. Adapun kendala-kendala yang dihadapi Puskeu dalam upaya untuk meraih nilai tertinggi pada indikator ini antara lain:

1. Keterlambatan/tidak tepat waktu bahkan ada yang tidak menyampaikan dokumen Perwabkeu, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Kapolri nomor 5 tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Keterlambatan/tidak tepat waktunya Polda dalam menindaklanjuti hasil verifikasi yang sudah disampaikan oleh Puskeu kepada masing-masing Polda;
3. Perwabkeu yang dikirim ke Puskeu berupa Belanja Barang dan Belanja Modal di atas Rp 500.000.000,- tidak bisa tepat waktu (seharusnya T+20 bulan berikutnya);
4. Penyerapan anggaran yang lambat sehingga menimbulkan pula keterlambatan dalam hal pengiriman dokumen Perwabkeu.

Terhadap kendala-kendala tersebut, Puskeu telah menerapkan langkah-langkah mitigasi demi menjamin tercapainya nilai tertinggi pada indikator ini. Langkah-langkah mitigasi yang dimaksud antara lain:

1. Memberikan arahan ke Bidkeu Mabes/Polda berupa surat untuk mengingatkan Satker yang memiliki tanggungjawab untuk segera mengumpulkan Perwabkeu ke Puskeu Polri sesuai tanggal yang tertera pada (T+20 bulan berikutnya);
2. Melaksanakan Asistensi dan konsultasi ke Jajaran Mabes/Polda terkait pelaksanaan verifikasi Perwabkeu supaya meminimalisir kesalahan dalam pengumpulan dokumen Perwabkeu;
3. Melakukan absensi Perwabkeu Belanja Barang/Modal dengan nilai tagihan di atas Rp500.000.000,-;

4. Menerbitkan.....

4. Menerbitkan NHPW dan ditandatangani oleh Kapuskeu Polri untuk kemudian dikirimkan kepada Bidkeu Polda/Mabes yang belum melengkapi Perwabkeu;
5. Bagi Bidkeu Polda/Mabes yang sudah melengkapi Perwabkeu maka akan diterbitkan NHPW oleh Kapuskeu Polri sebagai bukti administrasi kelengkapan dokumen Perwabkeu.

Persentase rekomendasi BPK atas LK Satker Polri yang telah ditindaklanjuti

Sebagaimana yang telah diamanatkan pada Undang-Undang Nomor Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Indonesia mengimplementasikan reformasi di bidang pengelolaan keuangan Negara yang semula menerapkan sistem akuntansi berbasis kas menjadi sistem akuntansi berbasis akrual. Reformasi di bidang pengelolaan keuangan Negara ini tentunya tidak serta merta menghilangkan kewajiban dan harapan kepada seluruh Kementerian/Lembaga untuk tetap dapat meraih dan menjaga opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangannya masing-masing. Opini WTP atas Laporan Keuangan ini merupakan muara dari pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara yang akuntabel dan transparan. Dalam upaya meraih opini WTP atas Laporan Keuangan, merupakan hal yang wajar apabila BPK memberikan rekomendasi perbaikan terhadap Laporan Keuangan kepada Kementerian/Lembaga agar Laporan Keuangannya mendapat opini WTP yang paripurna, tidak terkecuali kepada Polri.

Tabel 9 Persentase Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Satker Polri yang telah Ditindaklanjuti

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	100%	100%	100%
2021	100%	100%	100%
2022	100%	100%	100%
2023	100%	100%	100%
2024	100%	-	-

Persentase.....



Gambar 7 *Persentase Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Satker Polri yang ditindaklanjuti*

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa setiap tahunnya seluruh rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh BPK telah ditindaklanjuti oleh seluruh Satker Polri. Data realisasi pada tahun 2024 tentunya belum dapat disajikan mengingat pada saat Rarenstra ini disusun, BPK belum melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Polri. Hal ini merupakan bentuk dari komitmen Polri dalam menyelenggaraan pengelolaan keuangan Negara yang akuntabel dan transparan. Adapun Laporan Keuangan Instansi Pemerintah dapat dikatakan memenuhi syarat opini WTP apabila Laporan Keuangan telah disajikan secara memadai, informatif dan tidak menimbulkan penafsiran yang menyesatkan. Wajar di sini dimaksudkan bahwa Laporan Keuangan bebas dari keraguan dan ketidakjujuran serta lengkap informasinya. Pengertian wajar tidak hanya terbatas pada jumlah-jumlah dan ketepatan pengklasifikasian aktiva dan kewajiban, namun yang terpenting meliputi pengungkapan yang tercantum dalam Laporan Keuangan. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberikan oleh pemeriksa, apabila:

1. Tidak ada pembatasan lingkup pemeriksaan sehingga pemeriksa dapat menerapkan semua prosedur pemeriksaan yang dipandang perlu untuk meyakini kewajaran Laporan Keuangan atau ada pembatasan lingkup pemeriksaan tetapi tidak material dan dapat diatasi dengan prosedur pemeriksaan alternatif;
2. Tidak.....

2. Tidak ada tekanan dari pihak lain kepada pemeriksa;
3. Tidak ada penyimpangan terhadap standar akuntansi atau ada penyimpangan dari standar akuntansi tetapi tidak material.

Dalam menjaga komitmennya atas pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan, Satker Polri dihadapkan pada beberapa kendala. Salah satu kendala yang paling signifikan adalah untuk pertama kalinya penerapan rekonsiliasi data SPAN dan SAKTI dan data *To Do List* sesuai surat Dirjen Perbendaharaan Nomor: S27/PN/PB.6/2023 tanggal 20 September 2023 tentang Penerapan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Untuk memitigasi kendala tersebut, Polri beserta Satker jajaran telah menerapkan langkah-langkah strategis, antara lain:

- a. Pemeriksaan dengan wilayah;
- b. Rekonsiliasi asset dengan SLOG Polri;
- c. Bimtekni Bendahara Penerimaan Tahun 2023;
- d. Meningkatkan kualitas komunikasi dengan BPK RI selama proses pemeriksaan sampai dengan penyelesaian tindak lanjut LHP sesuai rekomendasi BPK.

Persentase kesesuaian antara laporan administrasi keuangan Bid Bia dengan Laporan Keuangan Polri

Laporan Keuangan adalah laporan yang berisi data transaksi keuangan organisasi pada periode tertentu. Laporan Keuangan Polri terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah. Selain dari laporan-laporan tersebut, terdapat satu laporan lagi yang disusun oleh Puskeu, yakni Laporan administrasi keuangan bidang Pembiayaan (selanjutnya disebut Laporan Pembiayaan). Laporan Pembiayaan merupakan laporan rutin dari pembiayaan yang dilakukan, yang dicatat

Kedalam.....

kedalam laporan administrasi Bidang Pembiayaan dan harus sesuai dengan Laporan Keuangan Polri. Adapun kinerja Puskeu pada indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 10 Persentase Kesesuaian Antara Laporan Administrasi Keuangan Bid Bia dengan Laporan Keuangan Polri

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	100%	-	-
2021	100%	-	-
2022	100%	100%	100%
2023	100%	100%	100%
2024	100%	-	-



Gambar 8 Persentase kesesuaian antara laporan administrasi keuangan Bid Bia dengan laporan keuangan Polri

Berdasarkan data di atas, dapat kita lihat bahwa tidak ada realisasi dari indikator ini pada tahun 2020 dan 2021. Hal ini dikarenakan indikator ini adalah indikator baru hasil dari Revisi Renstra pada tahun 2021 dan baru digunakan dan diukur mulai tahun 2022 hingga seterusnya. Ketika indikator ini mulai digunakan, tren dari realisasinya sangat positif, dengan mencatatkan tingkat realisasi dan tingkat capaian sebesar 100% setiap tahun. Data realisasi pada tahun 2024 tentunya belum dapat disajikan mengingat pada waktu penyusunan Rarenstra ini, Polri belum menyusun Laporan Keuangan untuk Tahun Anggaran 2024.

Persentase.....

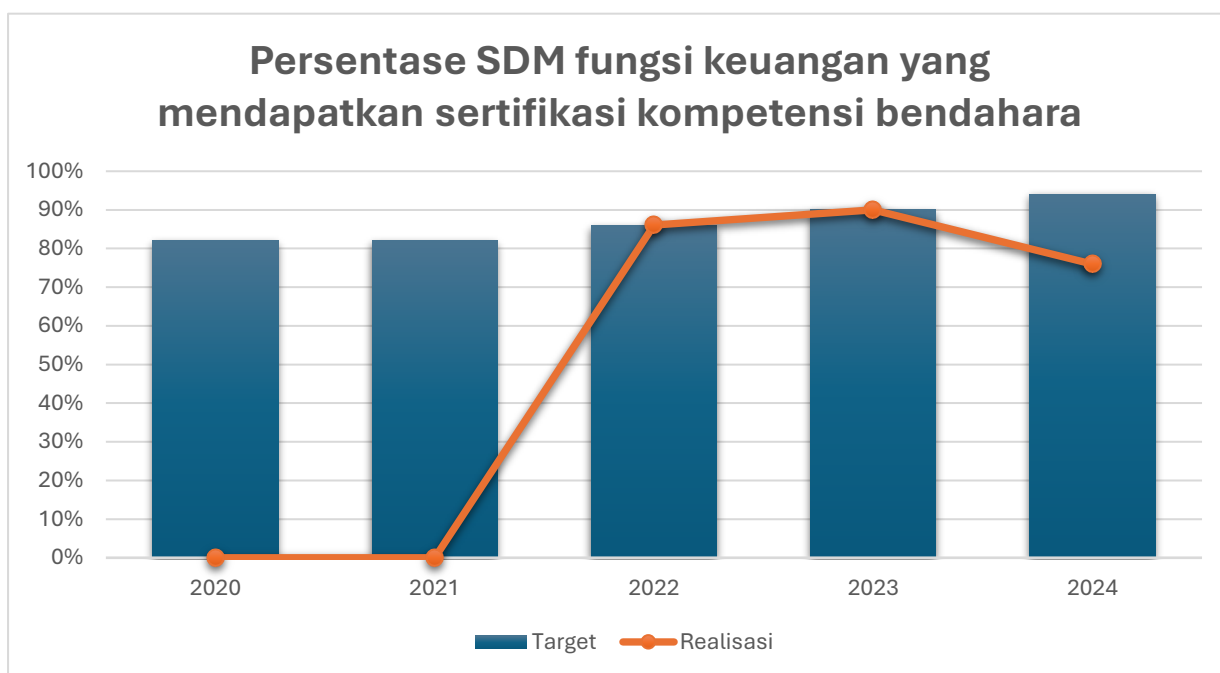
Persentase SDM fungsi keuangan yang mendapatkan sertifikasi kompetensi bendahara

Kegiatan sertifikasi kompetensi bendahara bagi SDM fungsi keuangan merupakan wujud dari komitmen Polri dan Puskeu untuk terus dapat memberikan pelayanan dan pengelolaan keuangan Negara yang akuntabel dan transparan. Walaupun demikian pada kenyataannya, kegiatan sertifikasi kompetensi bendahara ini belum dapat dilakukan di dua tahun pertama periode Renstra 2020-2024 karena terkendala anggaran. Barulah pada tahun 2022 Puskeu mendapatkan anggaran untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi. Hal ini disebabkan adanya pergeseran alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan dari DIPA Satker Lemdiklat Polri ke DIPA Satker Puskeu Polri pada bulan Agustus 2022.

Tabel 11 Persentase SDM Fungsi Keuangan yang Mendapatkan Sertifikasi Kompetensi Bendahara

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	82%	-	-
2021	82%	-	-
2022	86%	86.05%	100.1%
2023	90%	90.01%	100%
2024	94%	94% ¹⁰	100%

¹⁰ Nilai per TW III 2024 berdasarkan hasil anev



Gambar 9 Persentase SDM fungsi keuangan yang mendapatkan sertifikasi kompetensi bendahara

Berdasarkan data tabel dan grafik di atas, dapat kita lihat bahwa pada tahun 2020 dan 2021, tidak ada kegiatan sertifikasi kompetensi bendahara bagi SDM fungsi keuangan. Hal ini dikarenakan kegiatan tersebut tidak terdukung alokasi anggaran sehingga kegiatan sertifikasi kompetensi bendahara bagi SDM fungsi keuangan tidak dapat dilaksanakan. Barulah di tahun 2022 Puskeu Polri memiliki anggaran untuk kegiatan tersebut dan langsung melaksanakan kegiatan tersebut. Puskeu serta Satker lain yang mendukung kegiatan sertifikasi tersebut perlu mendapat apresiasi karena walaupun anggarannya baru mengalami pergeseran di bulan Agustus 2022, namun di tahun yang sama juga kinerja dari kegiatan tersebut sudah terukur dan terlaksana. Tren dari kinerja indikator ini juga terbilang memuaskan, dengan tingkat capaian tiap tahunnya mencapai 100% sejak anggaran kegiatan sertifikasi mengalami pergeseran. Adapun realisasi kinerja tahun 2024 pada indikator ini merupakan realisasi pada TW III Tahun 2024, dan merupakan angka yang sudah final karena kegiatan sertifikasi kebidaharaan telah selesai dilakukan.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Puskeu

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.....

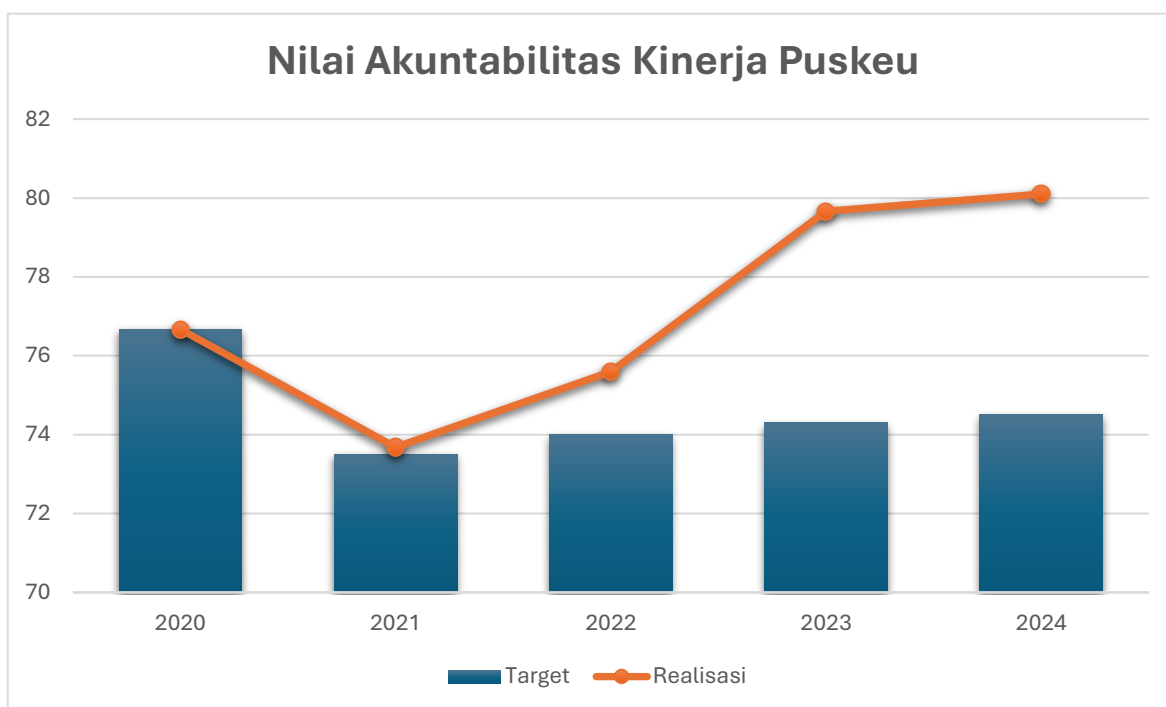
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nilai AKIP adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Penilaian AKIP meliputi lima komponen, yaitu:

1. Perencanaan Kinerja;
2. Pengukuran Kinerja;
3. Pelaporan Kinerja;
4. Evaluasi Internal;
5. Capaian Kinerja.

Tabel 12 Nilai Akuntabilitas Kinerja Puskeu

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	76.67	76.67	100%
2021	73.5	73.68	100.2%
2022	74	75.6	102.16%
2023	74.3	79.66	107.2%
2024	74.5	80.1 ¹¹	107.5%

¹¹ Nilai per TW III 2024 berdasarkan hasil anev



Gambar 10 Nilai Akuntabilitas Kinerja Puskeu

Berdasarkan data tabel dan grafik di atas, dapat dipastikan bahwa pada indikator ini, Puskeu berhasil mencatatkan tingkat realisasi mencapai target yang telah ditentukan. Perlu dicermati, walaupun terdapat tren penurunan pada tingkat realisasi di tahun 2021, akan tetapi tingkat realisasi tersebut tetap mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan terdapat penurunan target Nilai AKIP Puskeu dari tahun 2020 ke tahun 2021. Penurunan target Nilai AKIP ini merupakan bentuk adaptasi Puskeu terhadap lingkungan strategis yang dapat memengaruhi Puskeu, dan terbukti bahwa Puskeu dapat memprediksi hal tersebut dari sebelumnya. Adapun realisasi kinerja pada tahun 2024 baru berdasarkan pada data TW III dan masih dapat berubah pada TW IV 2024.

Lebih lanjut, Puskeu mencatatkan tren positif terkait Nilai AKIP ini. Sejak tahun 2022, tingkat realisasi Puskeu jauh melebihi target yang telah ditetapkan, dengan tingkat capaian 102.16% di tahun 2022 dan 107.2% di tahun 2023.

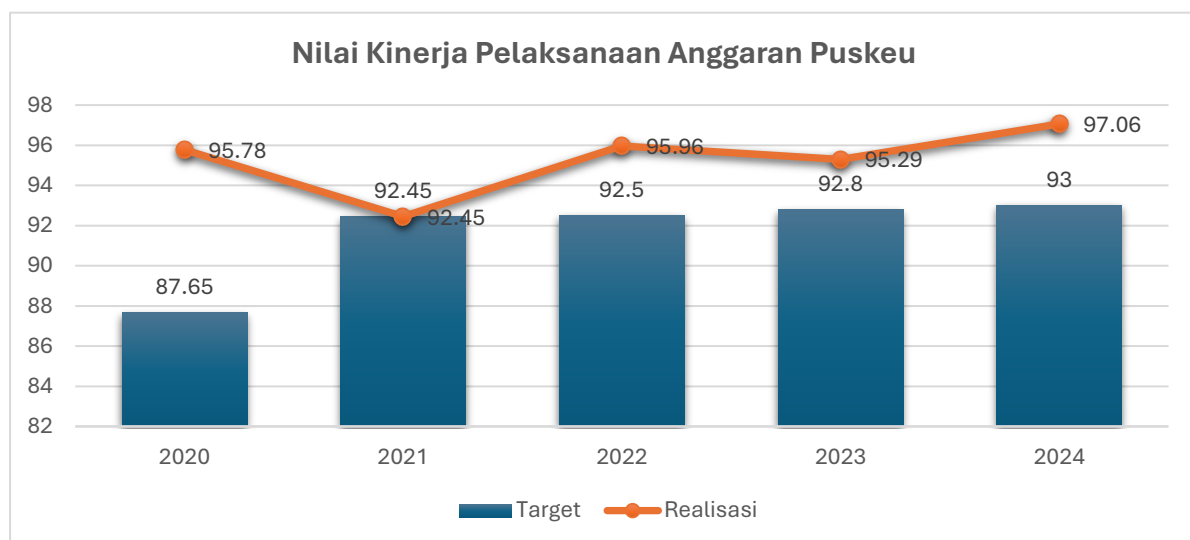
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Puskeu

Sebagai salah satu Satker Polri, selain diberikan tanggung jawab untuk menjaga dan meningkatkan Nilai IKPA Polri, Puskeu juga bertanggung jawab untuk meningkatkan dan menjaga Nilai IKPA di internal Puskeu. Penilaian terhadap capaian nilai.....

nilai IKPA itu tersebut mengalami sedikit perubahan untuk periode ini. Perubahan yang dimaksud terletak pada aspek dan indikator kinerja IKPA tahun ini, dimana sebelumnya terdapat 4 (empat) aspek dan 13 indikator kinerja, kini menjadi 3 (tiga) aspek dan 8 (delapan) indikator kinerja. Adapun ketiga aspek itu adalah kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Sementara delapan indikator kinerja terdiri dari revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, data kontrak, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM, penyerahan anggaran dan capaian *output*.

Tabel 13 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Puskeu

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	87.65	95.78	109.3%
2021	92.45	92.45	100%
2022	92.5	95.96	103.7%
2023	92.8	95.29	102.7%
2024	93	95.25 ¹²	102.4%



Gambar 11 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Puskeu

¹² Nilai per TW III 2024 berdasarkan hasil anev

Berdasarkan.....

Berdasarkan LKIP Puskeu yang sudah dituangkan pada tabel dan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa Puskeu Polri telah berhasil memenuhi seluruh target Nilai IKPA yang ditetapkan di dalam Renstra Puskeu 2020-2024. Walaupun memang dari tahun ke tahun tingkat realisasi berfluktuasi, namun hal tersebut tidak menghalangi Puskeu dalam mencatatkan tingkat capaian lebih dari 100% setiap tahunnya. Adapun penurunan realisasi pada tahun 2021 dan 2023 disebabkan oleh menurunnya nilai Deviasi Halaman III DIPA. Adapun nilai IKPA Puskeu pada tahun 2024 masih berdasarkan pada hasil anev di TW III, dan masih dapat berubah di TW IV 2024. Tingkat realisasi yang diproyeksikan akan tinggi ini merupakan buah dari komitmen Puskeu Polri dalam meningkatkan dan menjaga Nilai IKPA setiap tahunnya. Adapun Puskeu Polri telah menerapkan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan dan menjaga Nilai IKPA, antara lain:

1. Revisi DIPA

- a. Melakukan revidu atas DIPA secara periodik (minimal sekali di akhir triwulan), dan mengendalikan serta mengoptimalkan revisi anggaran dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan pada Satker.
- b. Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir) dan segera menyelesaikan pada Triwulan I.
- c. Meminimalkan atau menunda revisi pergeseran antarjenis belanja di akhir triwulan yang dapat menyebabkan trajektori penyerapan anggaran berubah.

2. Deviasi Halaman III DIPA

- a. Merevidu rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran (minimal sekali di akhir triwulan), serta menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja.
- b. Menyelaraskan RPD Halaman III DIPA dengan target penyerapan anggaran triwulanan. Dalam hal terdapat perubahan komposisi pagu per jenis belanja, agar memperhatikan perubahan target penyerapan anggaran dan melakukan penyesuaian pada RPD Hal III DIPA.

c. Mengajukan.....

- c. Mengajukan revisi Hal III DIPA sebelum batas akhir *cut off* RPD triwulanan dalam rangka penilaian IKPA.
3. Penyerapan Anggaran
- a. Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, serta tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.
 - b. Melakukan percepatan belanja, khususnya untuk belanja barang dan modal yang proses pengadaan barang dan jasanya dapat dimulai sejak awal tahun anggaran.
 - c. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun.
4. Belanja Kontraktual
- a. Mengidentifikasi dan mempersiapkan PBJ tahun anggaran mendatang untuk dilakukan percepatan lelang dan penandatanganan kontrak segera setelah DIPA ditetapkan.
 - b. Menyiapkan dokumen dan segera melakukan pendaftaran kontrak ke KPPN.
 - c. Memastikan pengadaan barang/jasa yang sifatnya sekaligus dan nilainya s.d. Rp200 Juta di selesaikan (s.d. pembayarannya kepada pihak ketiga) pada Triwulan I.
5. Penyelesaian Tagihan
- a. Segera menyelesaikan pembayaran dan tidak menunda proses penyelesaian tagihan yang pekerjaannya telah selesai (termasuk pekerjaan termin).
 - b. Memperhatikan ketentuan penyelesaian tagihan dalam 17 hari kerja sejak timbulnya hak tagih kepada Negara.
 - c. Lebih teliti, lengkap, dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST atau BAPP.
 - d. Tanggal BAST berlaku apabila pekerjaan (barang/jasa) telah diserahkan seluruhnya, sementara tanggal BAPP berlaku apabila pekerjaan (barang/jasa) dilakukan secara bertahap untuk pembayaran berdasarkan termin.

6. Pengelolaan UP.....

6. Pengelolaan UP dan TUP

- a. Menghitung kembali kebutuhan operasional bulanan Satker dan mengajukan UP Tunai secara rasional sesuai kebutuhan bulanan Satker.
- b. Menggunakan UP Tunai secara efektif dan efisien dengan mempercepat revolving UP Tunai paling sedikit 100% dalam satu bulan.
- c. Dalam mengajukan TUP, agar menyusun rencana penggunaan dan pengeluaran dalam satu bulan secara efektif dan meminimalkan setoran.
- d. Menyetor sisa dana UP dan TUP yang berada di Bendahara Pengeluaran/BPP sebelum akhir tahun anggaran berakhir.
- e. Memonitor status penggunaan UP/TUP pada Aplikasi OMSPAN (Karwas UP/TUP dan detil data IKPA UP/TUP).

7. Dispensasi SPM

- a. Memantau progres penyelesaian kegiatan sesuai rencana untuk menghindari keterlambatan dalam memproses SPM tagihan pada akhir tahun anggaran.
- b. Menetapkan mitigasi risiko penyelesaian pekerjaan dan pembayaran menjelang akhir tahun anggaran; dan
- c. Menghitung prognosis belanja agar dapat dieksekusi tepat waktu untuk menghindari penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun.

8. Capaian *Output*

- a. Menetapkan metode perhitungan capaian *output* untuk setiap RO yang dikelola, khususnya untuk output teknis yang memiliki variasi pengukuran capaian.
- b. Secara periodik menghitung tingkat kemajuan aktivitas (Progres/PCRO) dan capaian (Realisasi Volume RO/RVRO), memperhatikan *gap progress* capaian *output* dengan penyerapan anggaran.
- c. Melakukan pengisian data capaian *output* bulanan secara komprehensif, akurat, dan disiplin pelaporan sebelum batas akhir *open period reguler* (s.d. 5 (lima) hari kerja setelah bulan berakhir).
- d. Memonitor status data pada Aplikasi OMSPAN dan memastikan status data telah Terkonfirmasi.

e. Meningkatkan.....

- e. Meningkatkan koordinasi antar-PPK, dan PPK dengan pengelola kegiatan, dalam melakukan pengawasan, perhitungan, dan pelaporan data capaian *output*.

Capaian-Capaian Puskeu Polri Lainnya 2020-2024

Selain capaian-capaian kinerja yang sesuai dengan Renstra Puskeu 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja, Puskeu Polri selama periode 2020-2024 juga mencatatkan capaian-capaian lainnya yang perlu untuk diketahui, antara lain:

- Tahun 2020
 1. Menerima Piagam penghargaan atas keberhasilan Polri dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI
 2. Meraih penghargaan dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai Satker yang Bersinergi Terbaik
- Tahun 2021
 1. Menerima Piagam penghargaan atas keberhasilan Polri dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI
 2. Meraih penghargaan dari Kementerian PANRB berupa predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi tahun 2021
 3. Puskeu Polri masuk ke dalam 10 (sepuluh) besar terbaik nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2020 dengan nilai 77,50 (BB) dengan keterangan SANGAT BAIK, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
 4. Berhasil mengawal dan menyalurkan Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung;
 5. Puskeu Polri masuk ke dalam peringkat 10 (sepuluh) besar terbaik nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Tahun Anggaran 2021;
- Tahun 2022
 1. Menerima Piagam penghargaan atas keberhasilan Polri dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI
 2. Polri berhasil mengawal dan menyalurkan Bantuan tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKWL) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng pada.....

- pada tahun 2022 dengan memanfaatkan teknologi informasi aplikasi Puskeu Presisi; dan
3. Meluncurkan tiga aplikasi untuk mendukung kinerja dan integritas Polri, yakni Aplikasi Kontijensi, Jitu Presisi, dan Aplikasi Vaksinator;
- Tahun 2023
 1. Menerima penghargaan Terbaik ke II atas komitmen dalam penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia pengelolaan keuangan Negara melalui pembelajaran dan sertifikasi bidang anggaran dan perbendaharaan Tahun 2023
 2. Menerima Piagam penghargaan sebagai pengelola rekening pemerintah dalam bentuk *Virtual Account (VA)* untuk jenis rekening penerimaan
 3. Menerima Piagam penghargaan atas komitmen dan kerjasama dalam merealisasikan belanja Negara Tahun 2022 melalui mekanisme *Letter of Credit* secara tepat waktu dan akuntabel
 4. Menerima Piagam penghargaan sebagai peringkat I kategori penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendaha Pengeluaran dengan tepat waktu dan akurat *Cluster* Satker Pagu Besar lingkup KPPN Jakarta III
 5. Menerima Piagam penghargaan sebagai peringkat II kategori penilaian Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) *Cluster* Satker Pagu Besar lingkup KPPN Jakarta III
 6. Meluncurkan dua aplikasi terobosan untuk mendukung kinerja dan integritas Polri, yakni Jitu Presisi dan SELARAS.
 - Tahun 2024
 1. Menerima Piagam penghargaan atas keberhasilan Polri dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023.

Tantangan.....

Tantangan Pengelolaan Keuangan Polri 2020-2024

Adapun tantangan atau kendala yang masih dihadapi oleh Polri dan Puskeu dalam upaya mencapai target kinerja dan perlu untuk menjadi perhatian ke depannya antara lain:

1. Jumlah Satker Polri yang sangat besar (TA 2023 = 1435);
2. Sesuai dengan tugas dan fungsinya (Harkamtibmas), Polri selalu dilibatkan dalam kegiatan pengamanan pelaksana agenda nasional/internasional, sehingga mengakibatkan beberapa kegiatan rutin yang sudah direncanakan Satker/Satwil mengalami penundaan/perubahan waktu pelaksanaan;
3. Pada DIPA Satker Puskeu Polri dan Satker Bidkeu Polda dialokasikan anggaran khusus Direktif Kapolri/Kapolda untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diprediksi seperti kontijensi;
4. Masih terjadi beberapa proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan mendekati akhir Tahun Anggaran sehingga akan terjadi penumpukan tagihan di akhir Tahun Anggaran; dan
5. Terdapat beberapa Satker yang belum melakukan penyesuaian Hal III DIPA.

I.3. Potensi dan Permasalahan

Potensi

Polri merupakan suatu organisasi yang besar dan satuan kerjanya (Polda kewilayahan) tersebar ke seluruh penjuru Indonesia. Organisasi yang besar ini juga dari tahun ke tahun selalu mendapatkan dukungan anggaran yang besar. Hal ini dimaksudkan agar Polri dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan mencapai visi dan misi organisasi. Organisasi yang besar dengan dukungan anggaran yang besar ini pun menyimpan potensi yang besar yang masih perlu dikembangkan agar Polri dan juga Puskeu semakin optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun potensi-potensi yang perlu dikembangkan oleh Puskeu antara lain:

1. Meningkatkan.....

1. Meningkatkan level organisasi menjadi eselon I agar dapat menjalankan tugas dan fungsi sebagai pembina keuangan di lingkungan Polri menjadi lebih optimal;
2. Meningkatkan peran pengemban fungsi pelaksana teknis di Puskeu yang meliputi administrasi dan evaluasi pembiayaan, pengendalian pendanaan dan informasi keuangan, verifikasi pengelolaan keuangan dan penyajian Laporan Keuangan yang professional, transparan, akuntabel dan tepat waktu, sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah;
3. Peningkatan kerja sama bidang keuangan antara Puskeu Polri dengan *external stakeholder*;
4. Polri perlu mengadakan kajian guna mengoptimalkan sumber-sumber anggaran selain APBN, terutama sumber anggaran yang berasal dari PNPB dan BLU;
5. Pemanfaatan perkembangan teknologi *artificial intelligence* di era *society 5.0* dalam rangka menyelenggarakan sistem perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Polri yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi;
6. Penguatan *data security* di bidang keuangan yang saat ini tengah menjadi sorotan publik.

SWOT Analysis

Berdasarkan situasi dan kondisi dari lingkungan strategis saat ini, maka *Strength, Weakness, Opportunity, and Threat (SWOT) analysis* dari Puskeu dapat digambarkan secara singkat melalui empat kuadran di bawah ini:

Internal	
Strength	Weakness
<ol style="list-style-type: none"> 1. Puskeu Polri mendapat dukungan anggaran dari Polri dalam mencapai target kinerjanya 2. Nilai kinerja Puskeu Polri dari tahun ke tahun selalu memenuhi target 3. SDM Keuangan mendapatkan pendidikan dan pelatihan fungsi kebidaharaan secara berkala 4. Puskeu Polri telah menguasai sistem pelaporan instansi pemerintah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terpenuhinya alat dan infrastruktur pendukung untuk mengakses data <i>real-time</i> 2. Belum terpenuhinya SDM Keuangan yang berkompeten dalam mengoperasikan sistem pengelolaan keuangan Polri yang terintegrasi dan <i>real-time</i> 3. Puskeu Polri saat ini masih berada di tingkat eselon II sedangkan berdasarkan ruang lingkup tugas fungsi, koordinasi, dan kewenangan, Puskeu Polri seharusnya berada di tingkat eselon I
External	

Opportunity.....

Opportunity	Threat
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadvokasikan peningkatan sistem informasi dan teknologi secara bertahap 2. Mengadvokasikan restrukturisasi organisasi Puskeu untuk mengoptimisasi tugas dan fungsi Puskeu 3. Dalam lima tahun ke depan Polri sedang mengedepankan modernisasi operasional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesulitan dalam mengintegrasikan sistem keuangan Puskeu dengan sistem keuangan pihak <i>external stakeholder</i> 2. Perlunya regulasi yang memayungi setiap perubahan sistem dan metode operasional dapat memperlambat proses modernisasi operasional 3. Perubahan zaman yang begitu cepat membuat Puskeu perlu untuk terus beradaptasi

Permasalahan

Selain menjadi potensi yang perlu dikembangkan, besarnya organisasi Polri ini juga seringkali menimbulkan masalah yang perlu menjadi perhatian mengingat, tidak terkecuali masalah bagi Puskeu Polri dalam menjalankan fungsinya sebagai pembina fungsi keuangan di lingkungan Polri. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Puskeu dalam upaya mencapai target kinerjanya antara lain:

1. Belum terealisasinya pengembangan organisasi Puskeu Polri yang telah diusulkan berdasarkan tiga Surat Kapuskeu Polri, antara lain:
 - a. Surat Kapuskeu Polri Nomor: B/513/IV/KEU./2020/Puskeu tanggal 30 April 2020 tentang Buku Naskah Akademik Pengembangan Organisasi Pusat Keuangan Polri;
 - b. Surat Kapuskeu Polri Nomor: B/726/VI/KEU./2020/Puskeu tanggal 12 Juni 2020 tentang Buku Naskah Akademik Pengembangan Organisasi Pusat Keuangan Polri;
 - c. Surat Kapuskeu Polri Nomor: B/1203/X/KEU./2020/Puskeu tanggal 14 Oktober 2020 tentang Buku Naskah Akademik Pengembangan Organisasi Pusat Keuangan Polri;
2. Belum diperbaharuinya tugas dan fungsi Puskeu berdasarkan Perkap No. 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Mabes Polri, sehingga membatasi langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Puskeu dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan laporan keuangan Satker pusat dan jajaran serta fungsi Puskeu sebagai pembina keuangan di lingkungan Polri belum dapat diselenggarakan;

3. Unsur.....

3. Unsur pelaksana teknis Puskeu (Bidbia, Biddal, Bidverif, BidAPK) telah memiliki tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Mabes Polri, tetapi setiap bidang juga melaksanakan pekerjaan diluar aturan tersebut yang berdampak pada organisasi secara keseluruhan meskipun pekerjaan tersebut berada pada Satker lain;
4. Ketidaksetaraan diantara satuan kerja antara Puskeu Polri dengan Stamarena Polri dan Slog Polri dalam pengelolaan APBN yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan/pertanggungjawaban dan pengawasan yang menjadi satu kesatuan dan saling berkaitan serta tidak dapat dipisahkan antara satu dan yang lainnya, dimana perencanaan anggaran dilaksanakan oleh Srena Polri (Eselon I), pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh Satker Polri (Eselon III sampai Eselon I), pelaporan dan pertanggungjawaban dilaksanakan oleh Puskeu Polri (Eselon II), dan pengawasan anggaran dilaksanakan oleh Itwasum Polri (Eselon I). Dengan begitu, pelaporan keuangan di lingkungan Polri menjadi tidak optimal;
5. Ketidakjelasan rantai komando Puskeu Polri dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang SOTK Mabes Polri, Puskeu Polri merupakan Satker Eselon II yang secara struktur berada di bawah Kapolri langsung, tetapi dalam pelaksanaan tugas rantai komando Puskeu Polri selalu melewati Srena Polri yang menyebabkan Puskeu Polri kesulitan untuk melaksanakan tugas untuk koordinasi ataupun memberikan informasi kepada *stakeholder* internal Polri;
6. Belum terpenuhinya profesionalisme personel keuangan, sehingga Puskeu Polri selaku pembina fungsi keuangan akan terus menerus melakukan kegiatan peningkatan kemampuan personel di Bidang Keuangan Polri guna mewujudkan reformasi birokrasi dan profesionalisme dalam menghadapi tugas pokok dan fungsi terkait pengelolaan keuangan Negara di lingkungan Polri.
7. Sistem Informasi keuangan di lingkungan Polri di pusat sampai jajaran kewilayahan terjauh belum terintegrasi secara optimal dengan berbasis teknologi informasi; dan

8. Terdapat.....

8. Terdapat PNBPN yang tidak disetor tepat waktu, PNBPN yang digunakan langsung di luar mekanisme APBN, PNBPN kurang/belum dipungut dan PNBPN belum didukung dengan dasar hukum PNBPN yang memadai.

BAB II.....

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN PUSKEU POLRI

II.1. Visi dan Misi Polri

Sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan Awal Renstra Polri Tahun 2025-2029 bahwa Visi Polri untuk Tahun 2025-2029 yaitu:

**“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 melalui
Kepolisian yang Berorientasi pada Masyarakat”**

Pengertian terkait dengan pernyataan visi dijelaskan sebagai berikut:

1. Visi Polri menunjukkan aspirasi yang ingin diwujudkan di 2029, sejalan dengan pentahapan *Grand Strategy* Polri 2025-2045. Penguatan fondasi organisasi Polri diharapkan dapat memberikan dampak pada kondisi nasional, yakni Indonesia Maju.
2. Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas memiliki arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan Presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara Negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.
3. Kepolisian yang Berorientasi Masyarakat atau *Community Oriented Policing* (COP) adalah pendekatan pemolisian yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban dengan menekankan kolaborasi yang erta antara kopolisian dan masyarakat. Pendekatan ini berfokus pada sinergi antara polisi dan komunitas untuk mengidentifikasi, memahami, dan mengatasi masalah keamanan serta social. Kepolisian Berorientasi Masyarakat juga bertujuan untuk menciptakan hubungan yang lebih kuat dan saling mendukung antara polisi dan masyarakat. Melalui Kepolisian yang Berorientasi Masyarakat, Polri dapat lebih efektif dalam mengatasi masalah keamanan dan ketertiban serta berkontribusi pada Pembangunan komunitas yang lebih baik.

Dalam.....

Dalam rangka mewujudkan Visi Polri Tahun 2025-2029, Polri menetapkan Misi sebagai berikut:

“Melindungi, Melayani, dan Mengayomi masyarakat”

Adapun makna dari Misi Polri tersebut, yaitu:

1. Polri berperan dalam melindungi warga negara dari berbagai ancaman, baik itu kejahatan, bencana alam, atau situasi darurat lainnya. Tugas ini mencakup pencegahan kejahatan, penegakan hukum, dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.
2. Polri harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, yakni: memberikan bantuan dalam situasi darurat, memberikan informasi yang dibutuhkan, serta memastikan bahwa hak-hak warga negara dihormati dan dilindungi. Polri diharapkan untuk bersikap ramah, responsif, dan profesional dalam setiap interaksi dengan masyarakat.
3. Mengayomi berarti dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, Polri melakukannya dengan cara yang penuh perhatian dan empati. Dengan mengayomi, Polri berusaha untuk membangun hubungan yang harmonis dan saling percaya dengan masyarakat, sehingga tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib.

Guna mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi yang telah disampaikan di atas, Polri menetapkan 5 (lima) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

1. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Seluruh Wilayah NKRI.
2. Menegakkan Hukum secara Adil, Transparan, Legal, Humanis dan Setara (*equality before the law*)
3. Mewujudkan SDM Polri yang berintegritas dan Profesional
4. Membangun Sarana dan Prasarana Polri yang Modern sesuai perkembangan teknologi dan dinamika tantangan
5. Mentransformasi Polri menuju organisasi sipil yang rasional, modern, berintegritas dan profesional.

II.2. Visi....

II.2. Visi dan Misi Puskeu Polri

Visi merupakan suatu rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian organisasi yang ingin dicapai di masa depan. Visi sangat penting sebagai arah strategi dan pedoman melaksanakan strategi yang diformulasikan¹³. Visi juga menggambarkan arah dan aspirasi yang ingin dicapai serta memberikan panduan umum tentang arah strategis yang harus diambil untuk mencapainya. Adapun Visi Puskeu Polri Tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung Visi Polri 2025-2029, yaitu:

**“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Polri yang Modern,
Terintegrasi, Profesional, dan Akuntabel dalam rangka Bersama
Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”**

Dalam merumuskan redaksi Visi tersebut, beberapa proses penyelarasan dilakukan terhadap Tugas dan Fungsi Puskeu Polri, Arah Kebijakan dan Strategi dalam *Grand Strategy* Polri 2025-2045, *Roadmap* Program Dukungan Manajemen 2025-2045, *Roadmap* Puskeu Polri 2025-2045 dan Konsep Sasaran Strategis Renstra Polri 2025-2029.

Adapun makna dari Visi Puskeu Polri Tahun 2025-2029 tersebut, yaitu:

1. Pengelolaan keuangan Polri secara umum diharapkan mampu menyelenggarakan pengelolaan keuangan yang konsisten, efektif, modern, akuntabel dalam mencegah terjadinya penyimpangan atau temuan berulang serta bersinergi dengan baik dalam mendorong penyelesaian tindak lanjut atas setiap rekomendasi pemeriksaan.
2. Pengelolaan keuangan yang modern, mencakup penggunaan teknologi dengan pendekatan strategis, dan praktik manajerial untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya keuangan dalam organisasi.
3. Pengelolaan keuangan yang terintegrasi, yaitu penyelenggaraan sistem yang menggabungkan berbagai fungsi dan proses keuangan dalam satu *platform*

¹³ Kuncoro (2006).

terpadu, menggunakan teknologi informasi untuk memastikan bahwa semua data keuangan dikelola secara efisien, transparan, dan akurat.

4. Pengelolaan keuangan yang profesional diartikan bahwa terselenggaranya serangkaian proses, kebijakan, dan prosedur yang dirancang untuk mengelola sumber daya keuangan secara efisien, transparan, dan akuntabel.
5. Pengelolaan keuangan yang akuntabel diartikan bahwa pengelolaan sumber daya keuangan dilakukan secara transparan, jujur, dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anggaran yang dikelola digunakan secara efektif dan efisien, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan memenuhi standar serta regulasi yang berlaku.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung dan memastikan pencapaian Visi Puskeu Polri tahun 2025-2029, maka disusun pernyataan misi. Misi merupakan pernyataan-pernyataan yang mendefinisikan apa yang sedang atau akan dilakukan dan ingin dicapai dalam waktu dekat atau saat ini¹⁴. Misi juga merupakan sesuatu yang memiliki arti global dan cenderung generik. Oleh karena itu, ditentukan beberapa obyektif yang ingin dicapai dalam beberapa hal sehubungan dengan misi yang dicanangkan tersebut¹⁵. Secara singkat, misi juga menjelaskan alasan keberadaan organisasi, tugas utama, dan cara organisasi mencapai visinya. Sehingga, dalam hal ini, **Misi Puskeu Polri tahun 2025-2029** adalah:

- 1. Membangun sistem pengelolaan keuangan dan pembiayaan berbasis teknologi yang terintegrasi;**
- 2. Meningkatkan kualitas pembinaan fungsi keuangan Polri di Pusat sampai ke Wilayah; dan**
- 3. Mengoptimalkan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang selaras dengan regulasi dan perkembangan teknologi.**

Adapun penjabaran atau makna dari setiap Misi yang telah diuraikan di atas, yaitu:

¹⁴ Arman (2008).

¹⁵ Indrajit (2008).

1. Mengelola keuangan dan pembiayaan berbasis teknologi yang terintegrasi merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan keamanan dalam pengelolaan sumber daya keuangan. Implementasi yang efektif dapat memberikan manfaat jangka panjang yang signifikan bagi Polri, termasuk pengambilan Keputusan yang lebih baik dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku secara lebih mudah.
2. Meningkatkan kualitas pembinaan fungsi keuangan di Polri sangat penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaan dana publik. Hal ini juga dapat membantu dalam memenuhi regulasi dan standar akuntansi yang berlaku, dan meningkatkan kepercayaan publik dan mendukung pengambilan Keputusan strategis secara akuntabel.
3. Mengoptimalkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan dilakukan secara efektif, sesuai dengan regulasi yang berlaku, dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi.

II.3. Tujuan Polri dan Puskeu Polri

Merujuk pada hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Polri serta dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Polri, ditetapkan 5 (lima) tujuan Polri Tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah NKRI.
2. Menegakan hukum secara adil, transparan, legal, humanis dan setara (*equality before the law*).
3. Mewujudkan SDM Polri yang berintegritas dan profesional.
4. Membangun sarana dan prasarana Polri yang modern sesuai perkembangan teknologi dan dinamika tantangan.
5. Mentransformasi Polri menuju organisasi sipil yang rasional, modern, berintegritas dan profesional.

Guna.....

Guna mendukung proses transformasi pembangunan Indonesia khususnya dalam Transformasi Ekonomi secara nasional sesuai dengan yang tertuang dalam Rancangan Teknokratik Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) bahwa masih ditemukan keterbatasan sumber daya keuangan khususnya di daerah serta dibutuhkan upaya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilakukan dengan lebih hati-hati, antisipatif, responsif, dan suportif.

Tuntutan lainnya, dalam rangka mewujudkan sistem perencanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Polri yang efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan Naskah *Grand Strategy* Polri Tahun 2025-2045, salah satu upaya yang perlu dilakukan oleh Puskeu Polri yaitu mewujudkan modernisasi sistem pembiayaan dan pengelolaan keuangan yang terintegrasi antara pusat dan wilayah. Selain itu, dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Puskeu Polri Tahun 2025-2029, disusunlah **Tujuan Puskeu Polri Tahun 2025-2029**, yaitu:

1. Modernisasi sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, serta pengelolaan keuangan yang rasional dan terintegrasi.
2. Membangun SDM pengelola keuangan yang profesional dan berintegritas.
3. Meningkatkan kualitas sistem dan metode dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Adapun penjelasan untuk setiap tujuan tersebut, yaitu:

1. Modernisasi sistem pengelolaan keuangan secara keseluruhan yang rasional dan terintegrasi mengisyaratkan adanya keselarasan atau integrasi dari setiap komponen pengelolaan keuangan. Adapun antara perencanaan dan penganggaran harus bersifat rasional agar saat pertanggungjawaban menjadi lebih akuntabel. Modernisasi dan integrasi sistem dalam hal ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan akurasi dan keandalan kualitas pengelolaan keuangan yang hendak dilakukan.
2. SDM Pengelola keuangan yang profesional dan berintegritas merupakan investasi penting untuk memastikan pengelolaan keuangan yang sehat dan berkelanjutan, serta mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi secara....

secara efektif dan efisien berlandaskan hukum dan kepatuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Sistem dan metode dalam pengelolaan keuangan penting dalam memastikan kesesuaian antara kebijakan di internal dengan regulasi dan standar pengelolaan keuangan di level nasional.

II.4. Sasaran Strategis Polri

Sasaran strategis Polri untuk periode 2025-2029 berfokus pada modernisasi dan peningkatan efektivitas dalam menjalankan fungsi kepolisian serta pelayanan publik. Polri bertujuan untuk memperkuat kapasitas operasional melalui integrasi teknologi canggih, seperti sistem informasi berbasis data dan kecerdasan buatan, untuk meningkatkan responsivitas dan efisiensi dalam penegakan hukum. Berikut ini merupakan sasaran strategis dan indikator kinerja utama maupun penunjang untuk Polri pada tahun 2025-2029:

Tabel 14 Sasaran Strategis Polri 2025-2029

No.	Sasaran Strategis	Kode	Indikator Kinerja Utama/Penunjang
SI	Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Terkendali melalui Kepolisian yang Berintegritas, Modern, dan Akuntabel	IK <i>Outcome</i> Polri	Indeks Kamtibmas
SS1	Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Responsif dan Prediktif	IKU SS1	Indeks Harkamtibmas
SS2	Penegakan Hukum yang Humanis, Akuntabel, dan Berkeadilan	IKU SS2	Indeks Gakkum Polri
SS3	Pengembangan dan Pengelolaan SDM Polri yang Adaptif, Kompeten, dan Berintegritas secara Terpadu dan Optimal	IKP SS3.1	Indeks efektivitas pengelolaan SDM Polri
		IKP SS3.2	Indeks pembangunan kapasitas SDM Polri
SS4	Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Berdaya Guna dan Modern	IKP SS4.1	Indeks SPBE
		IKP SS4.2	Tingkat pemenuhan <i>Minimum Essential Police Equipment</i> (MEPE)

No.....

No.	Sasaran Strategis	Kode	Indikator Kinerja Utama/ Penunjang
		IKP SS4.3	Tingkat pemanfaatan inovasi Litbang Polri
		IKP SS4.4	Indeks kualitas data
SS5	Tata Kelola yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel	IKP SS5.1	Nilai SAKIP
		IKP SS5.2	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi
		IKP SS5.3	Opini BPK atas Laporan Keuangan
		IKP SS5.4	Nilai Reformasi Birokrasi
		IKP SS5.5	Tingkat internalisasi budaya integritas, kejujuran, dan kehormatan pada Polri
		IKP SS5.6	Nilai Kinerja Anggaran
		IKP SS5.7	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Polri
		IKP SS5.8	Tingkat persepsi publik terhadap reputasi Polri atas masalah hukum yang dihadapi
		IKP SS5.9	Indeks Kualitas Kebijakan

II.5. Sasaran Strategis Puskeu Polri

Merujuk pada keselarasan antara tugas dan fungsi Puskeu Polri dengan pencapaian Sasaran Strategis Polri ke-5 yang juga merupakan sasaran impact bagi Puskeu Polri yaitu **"Tata Kelola yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel"** dengan indikator kinerja *Indeks Organizational Capital*, yang mana salah satu indikator kinerja pembangunnya yaitu **"IKP SS5.3: Opini BPK atas Laporan Keuangan"**. Maka, dalam rangka mewujudkan sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut, Puskeu Polri sebagai Satuan Kerja (Satker) pada Tingkat Eselon II sebagai pengampu **Kegiatan "Pelayanan Administrasi Keuangan Polri"**, perlu merumuskan Sasaran Strategis yang selaras dengan Visi, Misi, dan Tujuan Puskeu Polri serta selaras dengan beberapa dokumen strategis lainnya. Berikut ini merupakan penjabaran Sasaran.....

Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Pendukung (IKP) Puskeu Polri untuk Tahun 2025-2029:

Tabel 15 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Puskeu Polri 2025-2029

Sasaran Strategis		Indikator Kegiatan		Penanggung Jawab
Sasaran Impact: Tata Kelola yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel		Indeks Organizational Capital		Polri
Kegiatan: Pelayanan Administrasi Keuangan Polri				
Sasaran Strategis (SS) 1	Terwujudnya pengelolaan keuangan Polri yang modern, efektif, dan akuntabel.	IKU	Opini BPK atas Laporan Keuangan Polri.	Puskeu; Bid APK
		IKP 1	Persentase Laporan Keuangan Satker Jajaran Mabes dan Wilayah yang Tepat Saji	Bid APK; Bidkeu I dan Bidkeu II Puskeu Polri
SS 2	Terselenggaranya penjaminan akurasi dan kualitas hasil verifikasi penyajian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan secara profesional.	IKP 2	Jumlah NPHPW* yang diterbitkan di lingkungan Polri	Bid Verif; Bidkeu I dan Bidkeu II Puskeu Polri
		IKP 3	Persentase Efektivitas Penerapan PIPK pada Satker di Lingkungan Polri yang memperoleh penilaian: ** Efektif atau Efektif Dengan Pengecualian	Bid Verif
SS 3	Terwujudnya kesesuaian administrasi pembiayaan yang modern, transparan, dan akuntabel.	IKP 4	Persentase Penyelesaian TKTM***	Bid Bia
SS 4	Terwujudnya pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan keuangan Satker Mabes dan Wilayah	IKP 5	Nilai IKPA Polri	Bid Dal
		IKP 6	Persentase Jumlah Satker Polri dengan nilai IKPA $\geq 93,75$	Bid Dal; Bidkeu I dan Bidkeu II Puskeu Polri
SS 5	Tata kelola Puskeu Polri yang bersih, transparan, dan akuntabel	IKP 7	Nilai AKIP Puskeu Polri	Set Puskeu Polri (Subbagren)
		IKP 8	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Puskeu Polri	Set Puskeu Polri (Subbagren), Urkeu
		IKP 9	Persentase SDM Fungsi Keuangan yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi Keuangan	Set Puskeu Polri (Subbagsumda)
		IKP 10	Indeks Profesionalitas SDM Puskeu Polri	Set Puskeu Polri (Subbagsumda)
		IKP 11	Jumlah Pelaksanaan Anev terhadap Dokumen Pembinaan Fungsi di Lingkungan Puskeu Polri	Set Puskeu Polri (Subbagbinfung)

Keterangan:

*) NPHPW : Nota Penutup Hasil Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan

***) PIPK : Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan

***) TKTM : Transfer Keluar Transfer Masuk

BAB III.....

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

III.1. Arah Kebijakan dan Strategi Polri

Dalam menyusun arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, serta kerangka kelembagaan, Puskeu Polri berpedoman pada arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan yang telah ditetapkan oleh Mabes Polri. Di bawah ini adalah sejumlah arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, serta kerangka kelembagaan yang dikembangkan dan relevan dengan tugas dan fungsi Puskeu Polri.

Renstra Puskeu Polri Tahun 2025-2029 sebagai pelaksanaan visi dan misi Presiden di bidang Harkamtibmas untuk mendukung pencapaian berbagai sasaran dan prioritas Pembangunan nasional pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Secara teknis dan prosedural penyusunan dokumen Renstra Puskeu Polri berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029.

Sebagaimana tertuang dalam Konsep Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang memiliki Tema Pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 dengan Sasaran Visi Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan dimana terdapat 5 (lima) Sasaran Visi Indonesia Emas dan 8 (delapan) Misi (Agenda) Pembangunan serta 17 Arah Pembangunan Indonesia Emas. Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah telah menetapkan fokus arah pembangunan nasional dan Arah Kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 dititikberatkan pada:

1. Penguatan Fondasi Transformasi melalui Transformasi Sosial;
2. Transformasi Ekonomi;
3. Transformasi Tata Kelola;
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia;
5. Ketahanan.....

5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas;
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan;
8. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan.

Dari 8 (delapan) Agenda Pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029, masing-masing agenda dijabarkan ke dalam beberapa sasaran yang dicapai melalui beberapa strategi. Khususnya dalam hal Transformasi Tata Kelola, Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia. Dalam hal ini, lembaga penegak hukum, tidak terkecuali Polri sebagai lembaga pengemban fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas), berperan besar dalam mewujudkan supremasi hukum, stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia. Terkhusus bagi Polri, perlu mengantisipasi berbagai isu-isu strategis terkait keamanan dan ketertiban masyarakat terkini, baik yang datang dari dalam, maupun dari luar negeri. Isu-isu tersebut, antara lain, meningkatnya intoleransi dan potensi konflik horizontal antar masyarakat; mencuatnya ancaman kejahatan transnasional termasuk terorisme dan perdagangan manusia dan narkoba lintas negara; serta kejahatan siber. Di samping itu, sebagaimana institusi publik pada umumnya, Polri juga dihadapkan pada tantangan ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi terhadap kinerja birokrasi. Masyarakat kian menuntut kesempurnaan institusi publik dalam memberikan pelayanan yang efektif dan efisien.

Dalam Naskah *Grand Strategy* Polri 2025-2045 dibagi menjadi 4 (empat) tahap, yaitu:

- Tahap I: 2025-2029 Modernisasi Organisasi (*Organisation Modernisation*).
- Tahap II: 2030-2034 Transformasi Digital (*Digital Transformation*).
- Tahap III: 2035-2039 Keunggulan Operasional/Lompatan Besar (*Quantum Leap*).
- Tahap IV: 2040-2045 Pencapaian Emas (*Golden Achievement*).

Bagi Polri, arah kebijakan dan strategi nasional menjadi landasan Polri dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi Polri dalam hal menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Di dalam proses penyusunan arah kebijakan dan.....

dan strategis Polri, tentunya Polri menjadikan kajian terkait lingkungan strategis yang sedang terjadi dan akan terjadi, baik itu dari internal maupun eksternal menjadi bahan pertimbangan utama. Arah kebijakan selanjutnya ditetapkan dengan mendasarkan pada visi, misi, tujuan, serta sasaran yang telah ditetapkan. Berikut adalah arah kebijakan dan strategi Polri untuk lima tahun ke depan (Tahun 2025-2029):

1. Sasaran strategis **“Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Responsif dan Prediktif”** dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

a. Arah Kebijakan peningkatan fungsi intelijen dalam deteksi dini dan pencegahan ancaman dan gangguan serta memperkuat system keamanan Negara secara responsive dan prediktif dilaksanakan dengan strategi:

- 1) Penguatan fungsi intelijen di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan lingkungan dalam negeri;
- 2) Meningkatkan peran deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi ancaman dan gangguan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan lingkungan di dalam dan luar negeri;
- 3) Mengoptimalkan operasi intelijen (penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan) terhadap potensi gangguan Kamtibmas secara konvensional dan siber;
- 4) Meningkatkan keamanan siber di lingkungan kepolisian;
- 5) Mengoptimalkan kegiatan kontra intelijen pencegahan terorisme, tindak pidana pencucian uang, serangan siber, dan transaksi *cryptocurrency*;
- 6) Meningkatkan peran deteksi dini serta pencegahan tindak pidana penyelundupan orang dan barang illegal.

b. Arah Kebijakan peningkatan upaya keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya secara responsif dan prediktif dilaksanakan dengan strategi:

1) Meningkatkan.....

- 1) Meningkatkan sinergitas dengan Masyarakat dan aparat penegak hukum lainnya dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - 2) Meningkatkan kesadaran Kamtibmas di Masyarakat dan aparat penegak hukum lainnya dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - 3) Mengoptimalkan pembinaan/penyuluhan terhadap penanggulangan bahaya judi, kejahatan transnasional, dan penyelundupan barang ilegal;
 - 4) Memperkuat sistem manajemen pengamanan objek vital nasional dan objek vital lainnya yang rentan;
 - 5) Melaksanakan penanganan konflik masyarakat secara humanis dan berkeadilan;
 - 6) Memperkuat sinergisitas antar insitusi aparat penegakan hukum dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme, kelompok radikal, dan gangguan Kamtibmas lainnya;
 - 7) Mengoptimalkan pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana terorisme di dalam negeri;
 - 8) Mengoptimalkan dukungan penanggulangan terorisme dalam rangka meminimalisir risiko (penyelamatan sandera, penjinakan bom,dll);
 - 9) Mengoptimalkan penanggulangan gangguan kamtibmas intensitas tinggi di dalam negeri;
 - 10) Mengoptimalkan dukungan personel Polri dalam misi perdamaian dunia.
- c. Arah Kebijakan peningkatan pemeliharaan keamanan, keselamatan, dan penegakkan hukum di wilayah yurisdiksi laut Indonesia, ALKI, dan Choke Point secara responsif dan prediktif dilaksanakan dengan strategi:

1) Meningkatkan.....

- 1) Meningkatkan kolaborasi dan sinergitas antar organisasi dalam pemeliharaan dan peningkatan keamanan, serta penegakan hukum di laut;
 - 2) Mengoptimalkan pengamanan perairan dan udara guna mendeteksi ancaman keamanan dan keselamatan di laut Indonesia;
 - 3) Meningkatkan keberhasilan dalam pengungkapan kejahatan di laut Indonesia;
 - 4) Meningkatkan kolaborasi dan peran aktif masyarakat pesisir dalam mendukung pengamanan laut;
- d. Arah Kebijakan peningkatan disiplin berlalu lintas melalui kegiatan Kamseltibcarlantas dilaksanakan dengan strategi:
- 1) Meningkatkan kesadaran, keselamatan, ketertiban, kelancaran dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya;
 - 2) Mengintegrasikan sistem komunikasi dan koordinasi penanganan permasalahan lalu lintas dari tingkat Polsek sampai tingkat Mabes Polri;
 - 3) Meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan dan pemeliharaan sarana prasarana lalu lintas.
- e. Arah Kebijakan peningkatan kehadiran Polri di wilayah perbatasan dan pulau terluar serta di 290 Lokasi Prioritas (Lokpri) dan 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dilaksanakan dengan strategi:
- 1) Meningkatkan infrastruktur, SDM, dan pelayanan operasional Polri pada wilayah Lokasi Prioritas (Lokpri) dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN);
 - 2) Meningkatkan kegiatan pelacakan dan penangkalan serta penegakan hukum terhadap keluar masuknya orang dan barang di wilayah PLBN baik di darat maupun laut;
 - 3) Mengoptimalkan penanganan kejahatan transnasional di wilayah perbatasan.
- f. Arah.....

- f. Arah Kebijakan peningkatan system kerja sama untuk memperkuat peran Polri dalam Harkamtibmas yang responsive dan prediktif dilaksanakan dengan strategi:
- 1) Meningkatkan kerja sama dan sinergisitas dengan institusi pemerintah dan swasta untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - 2) Meningkatkan peran dan kerja sama internasional dalam penanganan kejahatan transnasional dan misi perdamaian internasional;
 - 3) Meningkatkan sumber informasi dan *networking* yang memadai melalui Interpol;
 - 4) Memperkuat integrasi data Kriminal WNI/WNA melalui koordinasi dengan Kantor Perwakilan RI di LN;
 - 5) Meningkatkan kolaborasi dengan instansi luar negeri terkait dalam memberikan bantuan hukum kepada WNI di luar negeri.
- g. Arah Kebijakan penguatan kegiatan operasional Polri berbasis teknologi dan *data analytics* dilaksanakan dengan strategi:
- 1) Mengembangkan manajemen operasi kepolisian (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan) yang berbasis *data analytics*;
 - 2) Mengelola *data analytics* dari media konvensional dan digital secara efektif dalam penguatan kegiatan operasional kepolisian dan membangun kepercayaan publik;
 - 3) Meningkatkan penanggulangan berita negatif (hoaks) yang dapat mengganggu Kamtibmas berdasarkan *media analytics*;
 - 4) Memperkuat sistem informasi Polri berbasis "*Big Data* Polri" dalam operasional Polri;
 - 5) Melakukan pemutakhiran data kepolisian yang ter "*update*" secara akurat dan tepat waktu;
 - 6) Mengintegrasikan sistem informasi kepolisian dari tingkat Polsek sampai tingkat Mabes Polri dalam rangka harkamtibmas dan gakkum;
 - 7) Meningkatkan.....

- 7) Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan hasil Litbang Polri dalam pelaksanaan kegiatan operasional Polri.
- h. Arah Kebijakan memberikan pelayanan masyarakat yang optimal dan humanis dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban nasional dilaksanakan dengan strategi:
- 1) Menyelenggarakan dukungan pemeriksaan identifikasi DNA (Kemenlu);
 - 2) Mendukung program pemerintah (Posyandu, penurunan stunting) (Kemendagri)
 - 3) Meningkatkan efektivitas sistem pengaduan Masyarakat.
- i. Arah Kebijakan peningkatan desa/kelurahan sadar Kamtibmas dilaksanakan dengan strategi:
- 1) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - 2) Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi, penyelundupan manusia dan barang Ilegal;
 - 3) Memperkuat keterlibatan stakeholder terkait, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam cegah tangkal Kamtibmas dan mewujudkan desa/kelurahan sadar Kamtibmas;
 - 4) Memperkuat penerapan "keadilan restoratif serta peran mediasi" dalam penyelesaian konflik di masyarakat dan penegakan hukum terbatas.
- j. Arah Kebijakan peningkatan pelaksanaan Operasi Kepolisian termasuk pengamanan pemandangan di Ibukota Negara Baru dilaksanakan dengan strategi:
- 1) Memperkuat kegiatan operasi kepolisian di tingkat Mabes hingga ke wilayah;
 - 2) Melaksanakan.....

- 2) Melaksanakan kegiatan keselamatan dan reintegrasi di wilayah rawan, bencana dan wabah;
- 3) Menyiapkan kegiatan operasi pengamanan sebelum, saat dan pasca pemindahan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur.

2. Sasaran Strategis "**Penegakan Hukum yang Humanis, Akuntabel, dan Berkeadilan**", dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

a. Arah Kebijakan peningkatan pengungkapan 4 (empat) jenis kejahatan secara transparan, akuntabel, dan berbasis ilmiah (*Scientific Criminal Investigation*) dilaksanakan dengan strategi:

- 1) Meningkatkan kapabilitas penyidik dan penguatan kelembagaan penegakan hukum dalam rangka unkap kasus;
- 2) Melaksanakan sertifikasi bagi penyidik siber Polri guna mendukung Penguatan Pengamanan Infrastruktur Siber;
- 3) Meningkatkan kerja sama nasional internasional di bidang penyelidikan dan penyidikan; (Janji Presiden)
- 4) Mempercepat pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara tindak pidana 4 (empat) jenis kejahatan serta penanganan dan penegakan hukum kasus-kasus keamanan negara (terkait kejahatan terhadap ideologi negara), lingkungan hidup (termasuk Karhutla), terorisme, Siber, *Illegal Mining*, *Illegal Fishing*, korupsi, Narkoba termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Penyelundupan Manusia dan Barang; (Janji Presiden)
- 5) Meningkatkan pemberantasan kasus-kasus perjudian serta menutup akses ke situs judi (termasuk judi *online*);
- 6) Menangani kekhawatiran penduduk berjalan keluar di malam hari;
- 7) Memperkuat penerapan *Scientific Crime Investigation* (SCI) dalam pengolahan tempat kejadian perkara;

8) Memperkuat.....

- 8) Memperkuat penegakan hukum yang adil, transparan, legal, humanis dan setara.
- b. Arah Kebijakan peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal nasional yang terintegrasi dilaksanakan dengan strategi:
 - 1) Mengintegrasikan sistem data dan informasi kriminal antar satker Polri dan aparat penegak hukum;
 - 2) Mengembangkan standardisasi data kriminal nasional;
 - 3) Mengembangkan sistem informasi kriminal nasional yang terintegrasi;
 - 4) Memperkuat digitalisasi di lingkungan penegakan hukum
 - c. Arah Kebijakan percepatan penanganan tindak pidana yang melibatkan Perempuan dan anak secara humanis dan berkeadilan dilaksanakan dengan strategi:
 - 1) Memperkuat kapabilitas dan kompetensi penyidik/penyidik pembantu dalam perlindungan perempuan dan anak;
 - 2) Melanjutkan pembangunan ruang pelayanan khusus perempuan dan anak;
 - 3) Melaksanakan penindakan TP Perdagangan Orang (TPPO) dan menerapkan pendekatan "keadilan restoratif" terhadap kejahatan perempuan dan anak serta kaum disabilitas. (Janji Presiden)
 - 4) Mengoptimalkan pelayanan terhadap korban kekerasan Perempuan dan anak (KemenPPA)
 - 5) Mengevaluasi penambahan dimensi gakkum terkait penanganan tindak pidana berbasis Gender (PPA & PPO)
 - d. Arah Kebijakan memberikan pelayanan penegakan hukum yang adil, transparan, humanis dan akuntabel dilaksanakan dengan strategi:
 - 1) Menyediakan fasilitas rehabilitasi medis tindak pidana narkoba;
 - 2) Membangun sistem penegakan hukum yang terbuka dan akuntabel.

3. Sasaran.....

3. Sasaran Strategis **"Pengembangan dan Pengelolaan SDM Polri yang Adaptif, Kompeten, dan Berintegritas secara Terpadu dan Optimal"**, dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

a. Arah Kebijakan peningkatan kapabilitas dan kapasitas SDM Polri yang jujur, bermartabat dan berintegritas secara terpadu dan holistik dilaksanakan dengan strategi:

- 1) Menyiapkan program diklat yang sesuai dengan tantangan tugas dan kebutuhan terkini;
- 2) Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan Polri yang berorientasi pada pelayanan publik serta memperhatikan kepuasan masyarakat;
- 3) Meningkatkan relevansi kurikulum dan bahan ajar diklat dengan tantangan tugas;
- 4) Meningkatkan jumlah SDM Polri yang memiliki sertifikasi kompetensi;
- 5) Mengembangkan program kerja sama diklat dalam dan luar negeri;
- 6) Meningkatkan jumlah pendidik yang telah memiliki sertifikasi kompetensi;
- 7) Memperkuat kapasitas, kapabilitas dan integritas SDM Polri yang berorientasi pelayanan masyarakat yang optimal;
- 8) Menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai bhayangkara dalam diri personel Polri.
- 9) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM dalam pelaksanaan kegiatan operasional Polri berbasis teknologi dan *data analytics*;

b. Arah Kebijakan pengelolaan SDM secara professional, akuntabel, dan terintegrasi dilaksanakan dengan strategi:

- 1) Meningkatkan pemenuhan jabatan berdasarkan standar jabatan dan kompetensi;
- 2) Memperkuat.....

- 2) Memperkuat implementasi merit sistem;
 - 3) Menerapkan system reward and punishment berbasis kinerja;
 - 4) Meningkatkan proporsi Polwan;
 - 5) Meningkatkan kesejahteraan SDM Polri (Janji Presiden);
 - 6) Meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi SDM Polri secara adil dan transparan sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - 7) Melaksanakan rekrutmen kepolisian dengan prinsip BETAH dan sesuai dengan Analisa kebutuhan;
 - 8) Memperkuat implementasi pemenuhan personel berdasarkan analisis beban kerja (ABK);
 - 9) Melakukan kajian dan pemenuhan kebutuhan personel untuk pembentukan Polda baru dalam rangka pemekaran provinsi;
 - 10) Meningkatkan kesehatan SDM Polri secara fisik, psikis, dan mental.
- c. Arah Kebijakan pemindahan personel Polri ke Ibu Kota Negara Baru dilaksanakan dengan strategi:
- 1) Mempersiapkan personel Mabes Polri yang akan pindah ke Ibu Kota Negara baru;
 - 2) Menyusun *roadmap* pemindahan personel Mabes Polri ke Ibu Kota Negara Baru.
4. Sasaran Strategis **“Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Berdaya Guna dan Modern”**, dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- a. Arah Kebijakan modernisasi sarana dan prasarana Polri dilaksanakan dengan strategi:
- 1) Memetakan prioritas dan kebutuhan sarana prasarana Polri tahun 2025-2029 *Minimum Essential Police Equipment* (MEPE) termasuk peningkatan peran Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS).....

(BUMNIS) dan industri swasta nasional dalam pemenuhan Almatsus Polri;

- 2) Mempersiapkan kebutuhan sarana dan prasarana Polri di Ibu Kota Negara Baru;
 - 3) Melakukan modernisasi sarana prasarana operasional pelayanan kepolisian sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tingkat Mabes sampai ke wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil dan Terluar (PPKT);
 - 4) Melakukan modernisasi sarana dan prasarana operasional keamanan perairan (kapal patroli laut);
 - 5) Membangun *Big Data/Single Data Entry* Polri;
 - 6) Membangun sistem *Record Center* Polri;
 - 7) Membangun dan mengimplementasikan smart security di seluruh Markas kepolisian;
 - 8) Menyediakan ruang dan fasilitas kerja bagi SDM Polri berkebutuhan khusus;
 - 9) Mengembangkan Tata kelola arsip dan naskah dinas yang modern;
 - 10) Memperkuat sistem data dan informasi hukum Polri;
 - 11) Meningkatkan sarana dan prasarana keamanan siber di lingkungan Polri.
- b. Arah Kebijakan mengoptimalkan hasil Litbang Polri dilaksanakan dengan strategi:
- 1) Mengoptimalkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pengambilan kebijakan;
 - 2) Meningkatkan kolaborasi dan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di lingkungan Polri;
 - 3) Meningkatkan lingkup peralatan sertifikasi;
 - 4) Mengembangkan.....

- 4) Mengembangkan sistem penelitian yang terintegrasi di lingkungan Polri.
- c. Arah Kebijakan pengelolaan Aset Kepolisian yang akuntabel, terbuka, modern dan terintegrasi dilaksanakan dengan strategi:
- 1) Menerapkan sistem pengelolaan dan membangun rumah dinas/flat/barak dan rusun bagi personel Polri;
 - 2) Menyediakan dan meningkatkan kualitas dan fasilitas Kesehatan (rumah sakit/FKTP) dan layanan Kesehatan yang memadai bagi anggota Polri hingga tingkat Polres;
 - 3) Membangun dan meningkatkan kualitas dan fasilitas Kesehatan Polri (Rumah Sakit Bhayangkara) di seluruh Polda yang paripurna dalam mendukung tugas dan fungsi Polri, serta program nasional.
5. Sasaran Strategis **"Tata Kelola yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel"**, dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- a. Arah Kebijakan peningkatan pelayanan public yang prima dan kedekatan dengan masyarakat dilaksanakan dengan strategi:
- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik Polri;
 - 2) Menyederhanakan proses pelayanan publik bagi Masyarakat;
 - 3) Meningkatkan kemudahan akses terhadap pelayanan data dan informasi kriminal nasional;
 - 4) Memperkuat keterlibatan Polri dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan dengan pendekatan personal;
 - 5) Meningkatkan pengelolaan citra Polri di Masyarakat;
 - 6) Memperkuat kerja sama antara masyarakat, TNI, dan DPR dalam *criminal justice system* dan pengaduan masyarakat yang dapat menunjang kerja Polri;
 - 7) Menyelenggarakan.....

- 7) Menyelenggarakan pelayanan Kesehatan dilakukan dengan kendali mutu dan biaya, disertai sarana dan prasarana faskes yang memadai (BPJS Kesehatan).
- b. Arah Kebijakan penguatan Reformasi Birokrasi dan transformasi kelembagaan Polri dilaksanakan dengan strategi:
- 1) Membangun sistem penerapan budaya integritas, nilai-nilai kejujuran dan kehormatan pada setiap pelaksanaan tugas kepolisian dengan memedomani kode etik Polri;
 - 2) Meningkatkan manajemen kinerja Polri dari tingkat Mabes sampai dengan Polsek;
 - 3) Melakukan pengkajian dan penataan tusi (tugas dan fungsi) Polri di tingkat Mabes sampai Kewilayahan;
 - 4) Memperkuat kelembagaan dan tata kelola organisasi Polri di tingkat Mabes sampai Kewilayahan;
 - 5) Melakukan pengkajian dan penyederhanaan birokrasi yang lebih ramping dan tepat ukuran (*right sizing*), pengaturan organisasi yang memprioritaskan keberadaan jabatan fungsional dalam pengaturan susunan organisasi, dan pengalihan jabatan struktural eselon III ke bawah ke dalam jabatan fungsional, khususnya di tingkat Mabes Polri;
 - 6) Melakukan pembentukan satuan wilayah pada wilayah pemekaran;
 - 7) Meningkatkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Polri yang andal; (Janji Presiden);
 - 8) Memperkuat implementasi manajemen risiko hingga ke tingkat wilayah.
- c. Arah Kebijakan penguatan "Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran yang Akuntabel" dilaksanakan dengan strategi:
- 1) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Polri;
 - 2) Melakukan.....

- 2) Melakukan penyelarasan kinerja Polri sampai ke tingkat wilayah dan jajaran pelaksana;
 - 3) Membangun alokasi anggaran pada klasifikasi jenis belanja secara proporsional;
 - 4) Memperkuat akuntabilitas kinerja dan Anggaran Polri;
 - 5) Memperkuat sistem dan kualitas pelaporan keuangan Polri yang akuntabel, terintegrasi dan bersifat *real time*.
- d. Arah Kebijakan penguatan "Regulasi dan Sistem Pengawasan yang Efektif" dilaksanakan dengan strategi:
- 1) Meningkatkan kualitas penanganan komplain/pengaduan masyarakat secara efektif dan terpercaya;
 - 2) Meningkatkan mekanisme pengelolaan bantuan hukum untuk kejahatan lintas negara dalam penanganan kejahatan lintas negara;
 - 3) Meningkatkan efektivitas harmonisasi dan penyelarasan regulasi pemerintah ke Tingkat Polri
 - 4) Mempercepat proses pemenuhan regulasi di lingkungan Polri;
 - 5) Meningkatkan kepatuhan terhadap penerapan regulasi di lingkungan Polri.

III.2. Arah Kebijakan dan Strategi Puskeu Polri

Arah kebijakan, strategi Puskeu Polri 2025-2029 dikembangkan dengan memperhatikan arah kebijakan nasional RPJMN, serta arah kebijakan strategi Polri Tahap I Tahun 2025-2029, Program Dukma 2025-2029, Renja Polri sesuai Grand Strategy Polri Tahun 2025-2045, diantaranya:

1. Sasaran Strategis "**Terwujudnya pengelolaan keuangan Polri yang modern, efektif, dan akuntabel**" diwujudkan dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - a. Peningkatan kualitas Opini BPK atas Laporan Keuangan Polri yang tercermin dalam menurunnya catatan atau rekomendasi BPK terhadap Laporan Keuangan Polri. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut dan sesuai dengan.....

dengan *Statement of Responsibility (SOR)* pada setiap laporan keuangan Satker, maka strategi yang dapat dilakukan Puskeu adalah:

- 1) Menyusun laporan keuangan yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
 - 2) Melaksanakan Pengendalian Intern atas an Pelaporan Keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Pengelolaan keuangan Polri yang TEPAT (Tertib, Efektif-Efisien, Partisipatif, Akuntabel dan Terpercaya). Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dapat dilakukan Puskeu adalah:
- 1) Menerapkan pengelolaan belanja yang berkualitas melalui pengendalian anggaran yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan tepat waktu; dan
 - 2) Melakukan penyajian dan penyampaian laporan keuangan (mengikuti perkembangan jumlah satker di lingkungan Polri) yang diserahkan secara tepat waktu, tepat jumlah, dan memenuhi standar akuntansi pemerintah;
 - 3) Meningkatkan koordinasi, sinergi serta komitmen antara fungsi pengawasan, fungsi perencanaan, fungsi Logistik, fungsi Keuangan dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku penanggung jawab tata kelola keuangan tingkat Satker
 - 4) Menyelenggarakan pemantauan penerapan rekening *virtual account* oleh bendahara penerima Satker;
 - 5) Mengoptimisasi kegiatan rekonsiliasi data keuangan (verifikasi Perwabkeu Belanja Barang dan Modal Tingkat Satker Mabes Polri);
 - 6) Memastikan evaluasi atas catatan atau rekomendasi BPK terhadap Laporan Keuangan Polri telah ditindaklanjuti secara efektif; dan
 - 7) Menyempurnakan regulasi terkait pembinaan, pengendalian dan verifikasi pengelolaan keuangan Polri;

2. Sasaran.....

2. Sasaran Strategis "**Terselenggaranya penjaminan akurasi dan kualitas hasil verifikasi penyajian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan secara profesional**" diwujudkan dengan arah kebijakan berupa Peningkatan kualitas Laporan Keuangan Polri melalui proses verifikasi yang profesional dan independen. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dapat dilakukan Puskeu adalah:

- 1) Menyelesaikan Kegiatan Verifikasi Perwabkeu Belanja Barang dan Modal Tingkat Satker Mabes Polri;
- 2) Memperkuat sistem pengendalian dan verifikasi pengelolaan keuangan Polri Pusat dan Wilayah berbasis teknologi informasi;
- 3) Memperkuat database pengelolaan keuangan yang terintegrasi
- 4) Meningkatkan kualitas dan kapabilitas para Verifikator di lingkungan Polri dalam upaya tertib administrasi keuangan serta mengurangi dan mencegah terjadinya korupsi;

3. Sasaran Strategis "**Terwujudnya kesesuaian administrasi pembiayaan yang modern, transparan, dan akuntabel**" diwujudkan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

a. Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pembiayaan di lingkungan Polri. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dapat dilakukan Puskeu adalah:

- 1) Menyelenggarakan pelayanan pembiayaan (internal/eksternal) tanpa biaya tanpa tatap muka dalam rangka ZI atau WBBM;
- 2) Membangun sistem pelayanan pembiayaan secara digitalisasi atau *online system*; dan
- 3) Membangun sistem *block chain* dalam rangka penyelenggaraan laporan pembiayaan;

b. Peningkatan.....

- b. Peningkatan perencanaan, penganggaran, dan administrasi pelaksanaan keuangan Polri yang transparan dan akuntabel. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dapat dilakukan Puskeu adalah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dan anggaran di bidang pembiayaan dan operasional.

4. Sasaran Strategis **“Terwujudnya pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan Keuangan Satker Mabes dan Wilayah”** diwujudkan dengan arah kebijakan berupa Penguatan peran kelembagaan Puskeu Polri baik di pusat maupun wilayah. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dapat dilakukan Puskeu adalah:

- 1) Menyampaikan data jumlah anggaran tunjangan yang akan disalurkan oleh Bidang Pembiayaan Puskeu;
- 2) Menyelenggarakan pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan Satker dalam rangka Tersajinya Laporan Keuangan Wilayah melalui Kegiatan Rekonsiliasi;
- 3) Menyelenggarakan Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan Pejabat Pengelola Keuangan Satker Tingkat Wilayah Mabes Polri;
- 4) Melaksanakan dan meningkatkan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Polri Semester dan Tahunan;

5. Sasaran Strategis **“Tata kelola Puskeu Polri yang bersih, transparan, dan akuntabel”** diwujudkan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan tata kelola manajemen kinerja, perencanaan, penganggaran dan keuangan Polri yang transparan dan akuntabel. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dapat dilakukan Puskeu adalah:

- 1) Mengoptimalkan.....

- 1) Mengoptimalkan fungsi sistem informasi keuangan online dan aplikasi Puskeu Polri;
 - 2) Mengintegrasikan sistem informasi dan aplikasi Puskeu dengan sistem informasi milik stakeholder terkait;
 - 3) Modernisasi dan simplifikasi pengelolaan SDM Melalui transformasi digital;
 - 4) Meningkatkan reformasi birokrasi Puskeu Polri yang berdampak;
 - 5) Menyelenggarakan penguatan fungsi organisasi Puskeu Polri berbasis manajemen risiko;
 - 6) Menyusun dan memperbaharui SOP di lingkungan Puskeu berdasarkan dokumen Proses Bisnis;
 - 7) Menyelenggarakan penyempurnaan organisasi Puskeu Polri berbasis proses bisnis;
 - 8) Menyelenggarakan analisa dan evaluasi terhadap dokumen Proses Bisnis secara rutin.
- b. Peningkatan kompetensi SDM Keuangan. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dapat dilakukan Puskeu adalah:
- 1) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi SDM Keuangan Polri;
 - 2) Melaksanakan pemenuhan sesuai kualifikasi dan kebutuhan fungsi SDM Keuangan;
 - 3) Menyelenggarakan pemetaan kompetensi kebutuhan pelatihan peningkatan kemampuan fungsi SDM keuangan;
 - 4) Mengembangkan inovasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi SDM keuangan;

III.3. Kerangka.....

III.3. Kerangka Regulasi

Penetapan kerangka regulasi memastikan bahwa seluruh kegiatan selaras dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan, serta mematuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam kerangka regulasi ini mencakup pengaturan tentang pengelolaan anggaran, tata kelola sumber daya, dan prosedur operasional, yang secara keseluruhan mendukung implementasi yang efektif dan terukur guna menunjang strategi yang telah direncanakan. Berikut ini merupakan kerangka regulasi yang dibutuhkan dalam mencapai perencanaan Puskeu Polri selama 2025-2029 kedepan, diantaranya:

Tabel 16 Kerangka Regulasi Puskeu Polri 2025-2029

Kebutuhan Regulasi	Urgensi Kebutuhan	Satker Penanggung Jawab	Tahun Penyusunan					Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	
Pengkinian Regulasi terkait pengelolaan Pembayaran dan Pajak Tunjangan Kinerja	Menindaklanjuti perkembangan lingkungan strategis saat ini	Bidang Pembiayaan		✓				
Pengkinian Regulasi terkait pengelolaan Pembayaran dan Pajak Dana Direktif dan Dukungan Operasional Kapolri	Menindaklanjuti perkembangan lingkungan strategis saat ini	Bidang Pembiayaan				✓		
Pengkinian Regulasi terkait pengelolaan Pembayaran dan Pajak Dana Khusus (<i>reimbursement</i> misi Internasional, dll)	Menindaklanjuti perkembangan lingkungan strategis saat ini	Bidang Pembiayaan				✓		
Pengkinian Regulasi terkait pengelolaan Pembayaran dan Pajak Pinjaman Luar Negeri	Menindaklanjuti perkembangan lingkungan strategis saat ini	Bidang Pembiayaan				✓		
Pengkinian Regulasi terkait pengelolaan Pembayaran dan Pajak Pinjaman Dalam Negeri	Menindaklanjuti perkembangan lingkungan strategis saat ini	Bidang Pembiayaan				✓		

Kebutuhan.....

Kebutuhan Regulasi	Urgensi Kebutuhan	Satker Penanggung Jawab	Tahun Penyusunan					Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	
Pengkinian Regulasi terkait pengelolaan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)	Menindaklanjuti perkembangan lingkungan strategis saat ini	Bidang Pembiayaan			✓			
Pengkinian Regulasi terkait pengelolaan anggaran BLU (Badan Layanan Umum)	Kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang Pembiayaan		✓				
Pengkinian Regulasi terkait pengelolaan Hibah	Kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	Bidang Pembiayaan					✓	

III.4. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan mengacu pada struktur, peran, tanggung jawab, dan hubungan antar lembaga yang terlibat dalam implementasi Renstra Puskeu Polri. Kerangka ini dirancang untuk memastikan bahwa semua pihak yang berkepentingan dapat bekerja secara efisien dan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini merupakan kerangka kelembagaan yang dibutuhkan dalam mencapai perencanaan Puskeu Polri selama 2025-2029 kedepan, diantaranya:

Tabel 17 Kerangka Kelembagaan Puskeu Polri 2025-2029

STRATEGI	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
Peningkatan Eselonisasi Puskeu Polri (Semula Eselon II menjadi Eselon I)	Pengelolaan Administrasi Keuangan Polri	Perubahan eselonisasi Puskeu Polri:		1 Naskah			
		1. Penyusunan Naskah Akademik.					
		2. Penyiapan tugas dan Fungsi (SOTK)		1 Naskah			
		3. Analisis Beban Kerja		1 Naskah			

BAB IV.....

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

IV.1. Target Kinerja

Target kinerja yang tertuang dalam Renstra Puskeu Polri 2025-2029 merupakan acuan strategis bagi seluruh Bidkeu di Polda Kewilayahan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel selama 5 (lima) tahun ke depan. Target ini mencakup beberapa aspek utama, seperti peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, optimalisasi penggunaan teknologi informasi untuk mendukung proses keuangan, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang keuangan.

Target kinerja ini dirancang untuk memastikan pencapaian tujuan jangka panjang dengan menetapkan indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART). Dengan adanya target yang jelas dan terukur, dapat memberikan upaya pemastian dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, sekaligus sebagai alat evaluasi untuk menilai kemajuan yang dicapai secara berkala.

Tabel 18 Target Kinerja Rancangan Awal Renstra Puskeu Polri 2025-2029

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target					Penanggung Jawab	
		2025	2026	2027	2028	2029		
Kegiatan: Pelayanan Administrasi Keuangan Polri								
SS 1: Terwujudnya pengelolaan keuangan Polri yang modern, efektif, dan akuntabel.	IKU	Opini BPK atas Laporan Keuangan Polri.	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Puskeu; Bid APK
	IKP 1	Persentase Laporan Keuangan Satker Jajaran Mabes dan Wilayah yang Tepat Saji	92%	93%	94%	95%	96%	Bid APK; Bidkeu I dan Bidkeu II
SS 2: Terselenggaranya penjaminan akurasi dan kualitas hasil verifikasi penyajian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan secara profesional.	IKP 2	Jumlah NPHPW* yang diterbitkan di lingkungan Polri	280	300	320	340	380	Bid Verif; Bidkeu I dan Bidkeu II
	IKP 3	Persentase Efektivitas Penerapan PIPK pada Satker di lingkungan Polri yang memperoleh penilaian ** Efektif atau Efektif Dengan Pengecualian	15%	25%	35%	45%	55%	Bid Verif
SS 3: Terwujudnya kesesuaian administrasi pembiayaan yang modern, transparan, dan akuntabel.	IKP 4	Persentase Penyelesaian TKTM***	100%	100%	100%	100%	100%	Bid Bia
SS 4: Terwujudnya pengawasan dan	IKP 5	Nilai IKPA Polri	95,25	95,5	95,75	96	96,25	Bid Dal

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target					Penanggung Jawab	
		2025	2026	2027	2028	2029		
Kegiatan: Pelayanan Administrasi Keuangan Polri								
pengendalian terhadap pengelolaan Keuangan Satker Mabes dan Wilayah	IKP 6	Persentase Jumlah Satker Polri dengan Nilai IKPA \geq 93,75	80%	81,5%	83%	85%	87%	Bid Dal; Bidkeu I; Bidkeu II
SS 5: Tata kelola Puskeu Polri yang bersih, transparan, dan akuntabel	IKP 7	Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Puskeu Polri	80.1 (A)	80.2 (A)	80.3 (A)	80.4 (A)	80.5 (A)	Set Puskeu (Subbagren)
	IKP 8	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Puskeu Polri	76,5	76,6	76,7	76,8	76,9	Set Puskeu (Subbagren); Urkeu
	IKP 9	Presentase SDM Fungsi Keuangan yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi Keuangan	60%	65%	70%	75%	80%	Set Puskeu (Subbagsumda)
	IKP 10	Indeks Profesionalitas SDM Puskeu Polri	71	72	73	74	75	Set Puskeu (Subbagsumda)
	IKP 11	Jumlah Pelaksanaan Anev Terhadap Dokumen Pembinaan Fungsi di Lingkungan Puskeu Polri	4	4	4	4	4	Set Puskeu (Subbagbinfung)

Keterangan:

- *) NPHPW : Nota Penutup Hasil Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan
- **) PIPK : Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan
- ***) TKTM : Transfer Keluar Transfer Masuk

IV.2. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan dalam dokumen Rancangan Awal Renstra Puskeu Polri 2025-2029 dirancang untuk memastikan alokasi sumber daya yang efektif dalam mendukung program prioritas dan kegiatan strategis Puskeu Polri. Pendanaan akan difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, modernisasi infrastruktur keuangan, dan integrasi teknologi untuk memperkuat sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.

Selain itu, kerangka pendanaan juga mengakomodasi kebutuhan pembiayaan untuk program-program modernisasi operasional dan transformasi digital, yang akan memfasilitasi proses otomasi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan. Dana tersebut akan diarahkan untuk pengembangan sistem informasi keuangan terpadu yang selaras dengan perkembangan teknologi dan regulasi terbaru.

Untuk memastikan keberlanjutan pendanaan, strategi kerangka ini mencakup penguatan koordinasi dengan kementerian terkait, optimalisasi sumber pendanaan dari anggaran negara (Rupiah Murni-RM) atau Pinjaman Dalam Negeri (PDN), serta potensi.....

potensi kerjasama dengan lembaga internasional atau Pinjaman Luar Negeri (PLN). Pendekatan ini bertujuan menjaga stabilitas finansial dan mendukung pencapaian target kinerja Puskeu Polri hingga tahun 2029.

Tabel 19 Kerangka Pendanaan

Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Keterangan
Kegiatan: Pelayanan Administrasi Keuangan Polri		RM PLN PDN PNBP
Pengelolaan keuangan Polri yang profesional dan akuntabel. <i>Opini BPK atas Laporan Keuangan Polri</i>	Laporan Keuangan Polri dengan Opini BPK yaitu WTP (berkurangnya catatan dari BPK)	RM PLN PDN PNBP

BAB V.....

BAB V

PENUTUP

Dokumen Renstra Puskeu Polri 2025-2029 ini merupakan wujud komitmen Polri dalam memperkuat pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Selama lima tahun ke depan, Puskeu Polri akan menghadapi tantangan yang kompleks dalam upaya menjaga stabilitas dan efisiensi anggaran, terutama di tengah dinamika lingkungan strategis yang terus berubah. Oleh karena itu, Renstra ini dirancang sebagai panduan komprehensif yang berfokus pada penguatan sistem keuangan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penerapan teknologi untuk mendukung operasional pengelolaan keuangan yang lebih efektif.

Pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Renstra ini membutuhkan kerjasama dan sinergi yang kuat antara semua Satuan Kerja di lingkungan Polri. Komitmen dari seluruh jajaran dan seluruh level organisasi, sangatlah penting untuk memastikan setiap program dan kegiatan yang direncanakan dapat berjalan sesuai dengan harapan. Selain itu, Renstra ini juga diharapkan dapat menjadi landasan dalam membangun kepercayaan publik terhadap Polri, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, Puskeu Polri tidak hanya bertujuan untuk menjaga kelancaran operasional, tetapi juga memastikan bahwa setiap alokasi anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat maksimal bagi pelayanan kepada masyarakat.

Menyadari bahwa keberhasilan implementasi Renstra ini tidak dapat dicapai tanpa dukungan dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, Puskeu Polri akan terus menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk lembaga pengawas, pemerintah, dan masyarakat, untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang berintegritas dan berkelanjutan. Semoga dokumen ini dapat menjadi acuan yang memadai dalam menghadapi tantangan dan mewujudkan visi, misi, dan tujuan Puskeu Polri Tahun 2025-2029 yang modern, terintegrasi, profesional, dan akuntabel.

Dengan tersusunnya Rancangan Awal Renstra Puskeu Polri Tahun 2025-2029 ini, dapat menegaskan komitmen Puskeu Polri untuk terus berinovasi dan beradaptasi, memastikan.....

memastikan bahwa pengelolaan keuangan Polri semakin kuat dan mampu mendukung pelaksanaan tugas Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Jakarta, 18 November 2024
Kepala Pusat Keuangan Polri



LUKAS AKBAR ABRIARI, S.I.K., M.H.
BRIGJEN POLISI

LAMPIRAN

Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan

KERANGKA PENDANAAN RENSTRA PUSKEU POLRI TAHUN 2025-2029												
Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Puskeu Polri							Rp10.547.008	Rp11.285.299	Rp11.611.407	Rp12.424.206	Rp12.830.037	
Kegiatan: Pelayanan Administrasi Keuangan Polri							Rp7.345.742	Rp7.859.944	Rp8.410.140	Rp8.998.850	Rp9.628.769	Puskeu
	Terwujudnya pengelolaan keuangan Polri yang modern, efektif, dan akuntabel.											Puskeu
	<i>Opini BPK atas Laporan Keuangan Polri.</i>	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Rp3.201.266	Rp3.425.354,62	Rp3.201.267	Rp3.425.355,69	Rp3.201.268	Puskeu
	<i>Persentase Laporan Keuangan Satker Jajaran Mabes dan Wilayah yang Tepat Saji</i>	92%	93%	94%	95%	96%	Rp1.773.196	Rp1.897.319,72	Rp2.030.132,1	Rp2.172.241,35	Rp2.324.298,24	Bid APK; Bidkeu I dan II
	Terseenggaranya penjaminan akurasi dan kualitas hasil verifikasi penyajian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan secara profesional.											
	<i>Jumlah NPHPW yang Diterbitkan di Lingkungan Polri</i>	280	300	320	340	360	Rp288.045	Rp308.208,15	Rp329.782,72	Rp352.867,51	Rp377.568,24	Bid Verif; Bidkeu I dan II
	<i>Persentase Efektivitas Penilaian PIPK pada Satker di lingkungan Polri yang memperoleh penilaian : ** Efektif dan Efektif Dengan Pengecualian</i>	15%	25%	35%	45%	55%	Rp760.632	Rp813.876,24	Rp870.847,58	Rp931.806,91	Rp997.033,39	Bid Verif
	Terwujudnya kesesuaian administrasi pembiayaan yang modern, transparan, dan akuntabel.											
	<i>Persentase penyelesaian TKTM***</i>	100%	100%	100%	100%	100%	Rp109.182	Rp116.824,74	Rp125.002,47	Rp133.752,64	Rp143.115,33	Bid Bia
	Terwujudnya pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan Keuangan Satker Mabes dan Wilayah											
	<i>Nilai IKPA Polri</i>	95.25	95.5	95.75	96.0	96.25	Rp8.000	Rp8.560,00	Rp9.159,20	Rp9.800,34	Rp10.486,37	Bid Dal
	<i>Persentase Jumlah Satker Polri dengan Nilai IKPA ≥ 93,75</i>	80%	81.5%	83%	85%	87%	Rp433.659	Rp464.015,13	Rp496.496,19	Rp531.250,92	Rp568.438,49	Bid Dal; Bid Keu I; Bid Keu II
	Tata kelola Puskeu Polri yang bersih, transparan, dan akuntabel											
	<i>Nilai AKIP Puskeu Polri</i>	80.1	80.2	80.3	80.4	80.5	Rp63.434	Rp67.874,38	Rp72.625,59	Rp77.709,38	Rp83.149,03	Set Puskeu
	<i>Nilai Kinerja Anggaran Puskeu Polri</i>	76.5	76.6	76.7	76.8	76.9	Rp15.697	Rp16.795,79	Rp17.971,50	Rp19.229,50	Rp20.575,56	Set Puskeu
	<i>Presentase SDM Fungsi Keuangan yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi Keuangan</i>	60%	65%	70%	75%	80%	Rp3.814.119	Rp4.081.107,33	Rp4.366.784,84	Rp4.672.459,78	Rp4.999.531,97	Set Puskeu
	<i>Indeks Profesionalitas SDM Puskeu Polri</i>	71	72	73	74	75	-					Set Puskeu
	<i>Jumlah Pelaksanaan Anev Terhadap Dokumen Pembinaan Fungsi di Lingkungan Puskeu Polri</i>	4	4	4	4	4	Rp79.778	Rp85.362,46	Rp91.337,83	Rp97.731,48	Rp104.572,68	Set Puskeu

PROGRAM	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	KRO	RO
Program Dukungan Manajemen	Terwujudnya tata kelola keuangan Polri yang bersih, transparan, dan akuntabel.	Opini BPK atas Laporan Keuangan Polri	Pelayanan Administrasi Keuangan Polri	Terwujudnya pengelolaan keuangan Polri yang modern, efektif, dan akuntabel.	Persentase Laporan Keuangan Satker Jajaran Mabes dan Satker Jajaran Wilayah yang Tepat Saji	Bid APK Puskeu Polri Bidkeu I Puskeu Polri Bidkeu II Puskeu Polri	Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Umum Layanan Manajemen Keuangan
Program Dukungan Manajemen	Terwujudnya tata kelola keuangan Polri yang bersih, transparan, dan akuntabel.	Opini BPK atas Laporan Keuangan Polri	Pelayanan Administrasi Keuangan Polri	Terselenggaranya penjaminan akurasi dan kualitas hasil verifikasi penyajian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan secara profesional.	Jumlah NPHPW yang diterbitkan di lingkungan Polri	Bid Verif Puskeu Polri Bidkeu I Puskeu Polri Bidkeu II Puskeu Polri	Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Umum Layanan Manajemen Keuangan
Program Dukungan Manajemen	Terwujudnya tata kelola keuangan Polri yang bersih, transparan, dan akuntabel.	Opini BPK atas Laporan Keuangan Polri	Pelayanan Administrasi Keuangan Polri	Terselenggaranya penjaminan akurasi dan kualitas hasil verifikasi penyajian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan secara profesional.	Persentase Efektivitas Penerapan PIPK pada Satker di lingkungan Polri yang memperoleh penilaian : Efektif atau Efektif Dengan Pengecualian	Bid Verif Puskeu Polri	Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Umum Layanan Manajemen Keuangan
Program Dukungan Manajemen	Terwujudnya tata kelola keuangan Polri yang bersih, transparan, dan akuntabel.	Opini BPK atas Laporan Keuangan Polri	Pelayanan Administrasi Keuangan Polri	Terwujudnya kesesuaian pengelolaan keuangan dan administrasi pembiayaan yang modern, transparan, dan akuntabel	Persentase Penyelesaian TKTM	Bid Bia Puskeu Polri	Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Umum Layanan Manajemen Keuangan
Program Dukungan Manajemen	Terwujudnya tata kelola keuangan Polri yang bersih,	Opini BPK atas Laporan Keuangan Polri	Pelayanan Administrasi Keuangan Polri	Terwujudnya pengawasan dan pengendalian terhadap	Nilai IKPA Polri	Bid Dal Puskeu Polri	Layanan Dukungan Manajemen	Layanan Umum Layanan

Program.....

PROGRAM	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	KRO	RO
	transparan, dan akuntabel.			pengelolaan keuangan Satker Mabes dan Wilayah			Internal Layanan Manajemen Kinerja Internal	Manajemen Keuangan
Program Dukungan Manajemen	Terwujudnya tata kelola keuangan Polri yang bersih, transparan, dan akuntabel.	Opini BPK atas Laporan Keuangan Polri	Pelayanan Administrasi Keuangan Polri	Terwujudnya pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan keuangan Satker Mabes dan Wilayah	Persentase Jumlah Satker Polri dengan Nilai IKPA \geq 93,75	Bid Dal Puskeu Polri; Bidkeu I Puskeu Polri; Bidkeu II Puskeu Polri;	Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Umum Layanan Manajemen Keuangan
Program Dukungan Manajemen	Terwujudnya tata kelola keuangan Polri yang bersih, transparan, dan akuntabel.	Opini BPK atas Laporan Keuangan Polri	Pelayanan Administrasi Keuangan Polri	Tata kelola puskeu Polri yang bersih, transparan dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Puskeu Polri	Set Puskeu Polri (Subbagren)	Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Umum Layanan Manajemen Keuangan
Program Dukungan Manajemen	Terwujudnya tata kelola keuangan Polri yang bersih, transparan, dan akuntabel.	Opini BPK atas Laporan Keuangan Polri	Pelayanan Administrasi Keuangan Polri	Tata kelola puskeu Polri yang bersih, transparan dan akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Puskeu Polri	Set Puskeu Polri (Subbagren), Urkeu	Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Umum Layanan Manajemen Keuangan
Program Dukungan Manajemen	Terwujudnya tata kelola keuangan Polri yang bersih, transparan, dan akuntabel.	Opini BPK atas Laporan Keuangan Polri	Pelayanan Administrasi Keuangan Polri	Tata kelola puskeu Polri yang bersih, transparan dan akuntabel	Presentase SDM Fungsi Keuangan yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi Keuangan	Set Puskeu Polri (Subbagsumda)	Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Umum Layanan Manajemen Keuangan

Program.....

PROGRAM	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	KRO	RO
Program Dukungan Manajemen	Terwujudnya tata kelola keuangan Polri yang bersih, transparan, dan akuntabel.	Opini BPK atas Laporan Keuangan Polri	Pelayanan Administrasi Keuangan Polri	Tata kelola puskeu Polri yang bersih, transparan dan akuntabel	Jumlah Pelaksanaan Anev Terhadap Dokumen Pembinaan Fungsi di Lingkungan Puskeu Polri	Set Puskeu Polri (Subbagbinfung)	Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Umum Layanan Manajemen Keuangan
Program Profesionalisme SDM Polri	Pengembangan dan pengelolaan SDM Polri yang adaptif, kompeten, dan berintegritas secara terpadu dan optimal	Indeks Profesionalitas SDM Polri	Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Polri	Pengembangan dan pengelolaan SDM Puskeu Polri yang adaptif, kompeten, dan berintegritas secara terpadu dan optimal	Indeks Profesionalitas SDM Puskeu Polri	Set Puskeu Polri (Subbagsumda)	Layanan Manajemen SDM Internal	Layanan pembinaan jasmani dan rohani pegawai pada Polri Layanan Psikologi Polri